

**PERAN DAN TANTANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ACEH DALAM MENSINERGIKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN
DENGAN SDG 4 (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4*)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RISSA SAHARA

NIM. 220503005

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2026/1447

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN DAN TANTANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ACEH DALAM MENSINERGIKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DENGAN
SDGS 4 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Ilmu Perpustakaan

Diajukan Oleh:

RISSA SAHARA
NIM. 220503005

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Ruslan, S.Ag., M.Si., M.LIS. NIP. 197701012006041004	T. Mukhan Safri, M.I.P. 199101082019031007

Disetujui oleh Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan

AR-RANIRY

Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS.
NIP. 197711152009121001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERAN DAN TANTANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH DALAM MENSINERGIKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DENGAN SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 04 Agustus 2026
20 Safar 1448

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi

Ketua,

Ruslan, S.Ag., M.Si., M.LIS.
NIP. 197701012006041004

Sekretaris,

T. Mulkan Safri, M.IP.
NIP. 199101082019031007

Penguji I,

Dr. Suraiya, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197511022003122002

Penguji II,

Nurhavati Ali Hasan, M.LIS.
NIP. 197307281999032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rissa Sahara
NIM : 220503005
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Peran Dan Tantangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Dalam Mensinergikan Program Perpustakaan Dengan *SDGs 4 (Sustainable Development Goal 4)*

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2026

Peneliti,



Rissa Sahara

NIM. 220503005

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul: **“Peran Dan Tantangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Dalam Mensinergikan Program Perpustakaan Dengan *Sdgs (Sustainable Development Goal 4)*”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir dan menyelesaikan masa studi di Fakultas Adab dan Humaniora dengan mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Perpustakaan. Salawat serta salam penulis curahkan pada baginda Rasulullah Saw, yang telah memberikan perubahan kepada umat, dari zaman kebatilan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kepenulisan skripsi ini.

1. Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, beserta staf yang membantu kelancaran pembuatan skripsi;
2. Bapak Mukhtaruddin, M.LIS., selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Ruslan, S.AG., M.SI., M.LIS dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu pengerjaan skripsi ini;

4. Bapak Ruslan S.AG., M.SI, yang juga sebagai penasehat akademik selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
5. Ibunda Yusniar binti Adam yang telah memberikan segala bentuk dukungan, baik dari segi finansial maupun tindakan emosional kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk setiap doa yang mungkin tidak pernah kudengar, setiap pengorbanan yang mungkin tidak selalu mampu kubalas, dan setiap kali Ibu tetap percaya ketika aku sendiri mulai meragukan diriku sendiri.
6. Bangtan, Tubatu, dan Cortis. Hari-hari ketika penulis harus berpindah dari rumah sakit, kampus dan berbagai tempat lain dalam satu hari, menelan banyak pil obat warna-warni berbulan-bulan, menahan efek samping di depan layar laptop sambil berpikir *apakah teorinya benar?* Cukup membuat pusing dan ketika membuka layar, penulis menemukan kalian kemudian tertawa. Jauh terasa lebih ringan. *Perhaps you will never know how much happiness you have brought to someone you have never met. I mean just seeing their content makes my day so much better.* Teruslah berkarya dan tertawa karena di suatu tempat, ada seseorang yang menemukan sedikit cahaya dari hal-hal yang kalian lakukan.
7. Rekan-rekan Mahasiswa sepejuangan dalam menimba ilmu, baik yang berasal dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora maupun dari program studi lainnya yang masih selingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

8. Program Beasiswa KIP Kuliah yang telah banyak membantu dalam hal finansial selama masa studi;
9. Terakhir, untuk Rissa Sahara yang sudah berjuang untuk meraih tujuan, dan akan kembali berjuang untuk tujuan-tujuan lainnya. Semangat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aaminn ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 01 Agustus 2026

Penulis

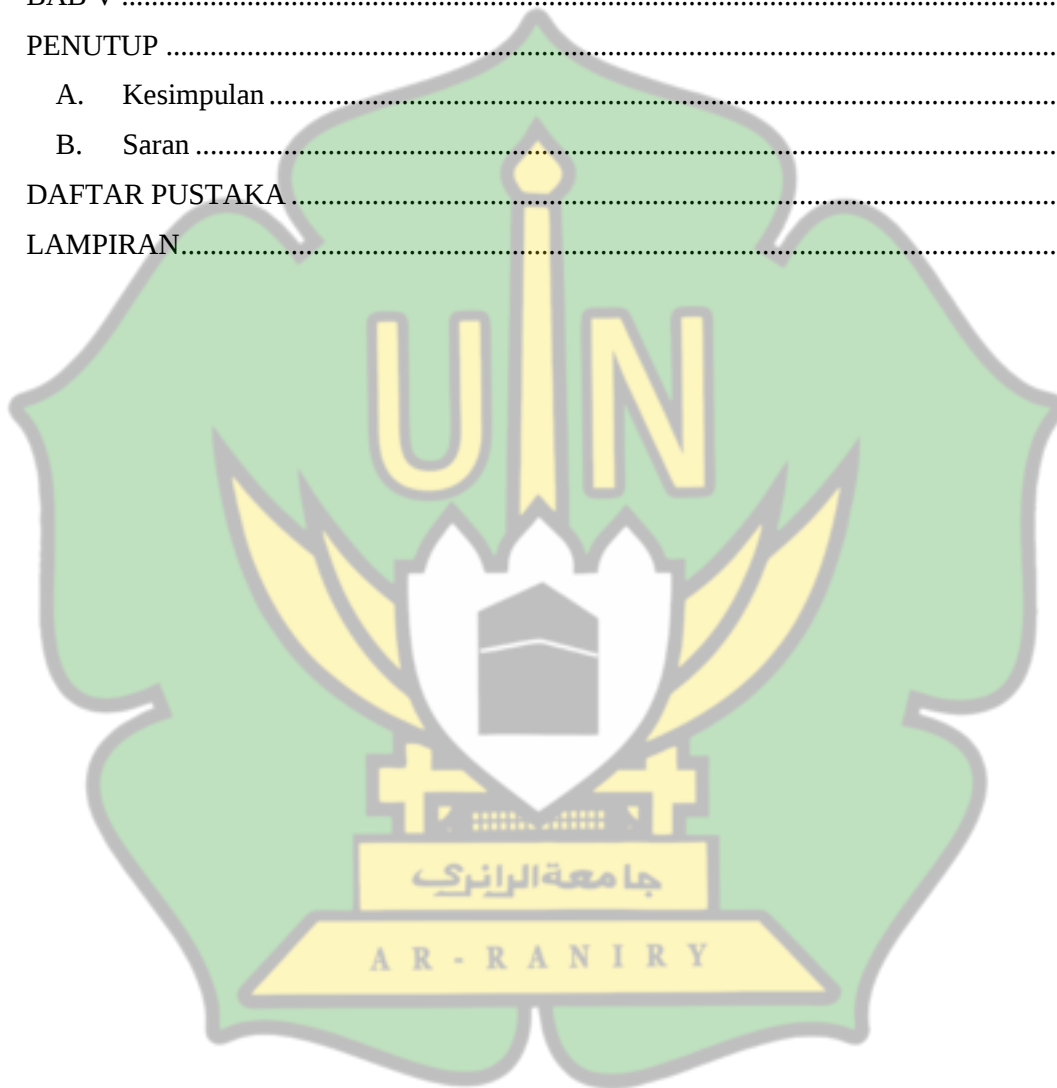
Rissa Sahara
NIM. 220503005



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Pustaka	14
B. Peran Perpustakaan Umum.....	17
C. Tantangan Perpustakaan Umum	20
D. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	25
E. Peran Perpustakaan dalam Mendukung SDGs (Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda)	33
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Rancangan Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Kredibilitas Data	46

BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian	52
A. Pembahasan	77
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96



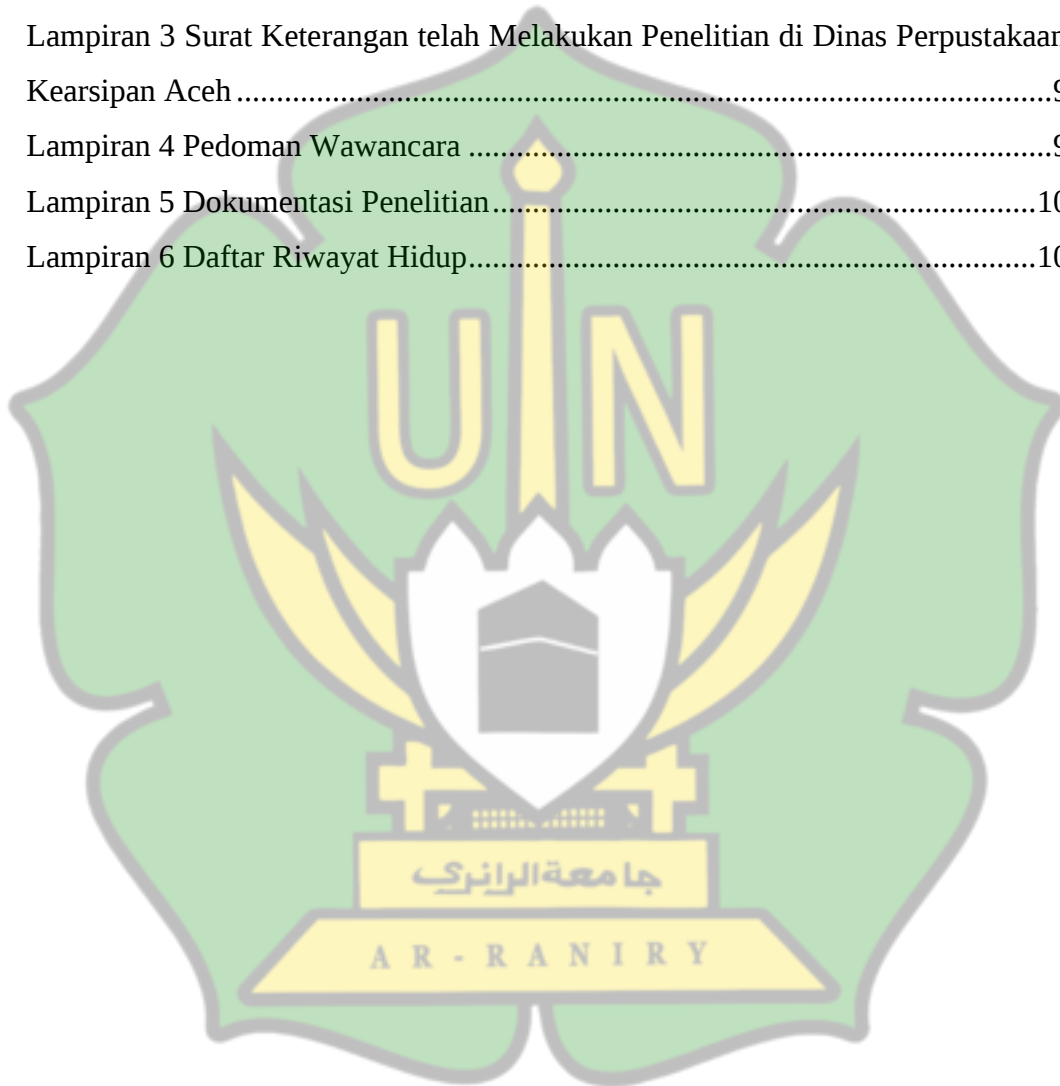
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Pemetaan Program Literasi yang dilakukan oleh DPKA.....	53
Tabel 4.2 Kegiatan BIMTEK Literasi tahun 2025.....	59
Tabel 4.3 Segmentasi Program Inklusi Sosial DPKA Berdasarkan Usia	55
Tabel 4.4 Alokasi Koleksi DPKA.....	58
Tabel 4.5 Jumlah Perpustakaan Desa yang Melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2019-2025.....	62
Tabel 4.6 Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2024-2025.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	94
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.....	95
Lampiran 3 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	96
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	97
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	100
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	101



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan Sustainable Development Goal (SDG) 4 tentang pembanguna berkualitas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran dan tantangan DPKA dalam tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan Sustainable Development Goal (SDG) 4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah berperan dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4 melalui penyelenggaraan berbagai program literasi dan layanan yang menyasar seluruh kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga masyarakat umum. Program-program tersebut mendukung peningkatan literasi dini, pembelajaran sepanjang hayat, akses terhadap informasi, serta penyediaan ruang belajar yang inklusif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, yaitu keterbatasan anggaran yang memengaruhi keberlanjutan program, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan, serta belum adanya dokumen atau kebijakan resmi yang secara eksplisit menjadikan SDG 4 sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Akibatnya, meskipun berbagai program telah berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4, keterkaitan tersebut belum terdokumentasikan secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara program perpustakaan dan SDG 4 telah terwujud secara substantif melalui implementasi berbagai kegiatan literasi dan inklusi sosial, namun masih diperlukan penguatan dari aspek kebijakan, perencanaan, dan dokumentasi agar kontribusi perpustakaan terhadap pencapaian SDG 4 dapat lebih terarah dan terukur.

Kata kunci: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, SDG 4, perpustakaan, literasi, inklusi sosial, pembelajaran sepanjang hayat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak mendasar yang harus didapatkan oleh masyarakat adalah pendidikan. Pada dasarnya, adanya pendidikan dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan memiliki hubungan yang erat karena peran krusial dalam membantu suatu individu sehingga diperlukan penyesuaian terhadap pendidikan dalam hal perkembangan dan kemajuan bangsa. Ini dikarenakan pendidikan sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat dan apabila berkembang relevan dengan keadaan masyarakat akan memiliki potensi inovatif serta kreatif. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sebuah kemajuan bangsa, tidak hanya sekadar sarana perubahan bagi penerus bangsa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan sebuah transformasi yang nyata. Pendidikan berkualitas akan menyongsong inovasi generasi muda yang nantinya akan menciptakan dampak yang penting dalam menerapkan konsep dari pembangunan berkelanjutan.¹

Sustainable Development Goals memiliki tujuan, salah satunya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas. SDG 4 memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya pendidikan berkualitas yang inklusif, berkeadilan, serta membuka kesempatan belajar *lifelong* bagi semua orang. Ini membantu untuk meminimalisir perbedaan dan kesenjangan dalam dunia pendidikan, baik dari segi akses maupun

¹ Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti, and Najdah Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 975–85, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.

kualitas.² *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui *Education for Sustainable Development* (ESD) era 2004-2015, pada Agenda 21 mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki peran yang krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. UNESCO juga ikut andil dalam mengkampanyekan kebijakan pendidikan dan praktek yang dapat membantu menangani tantangan global dengan mensosialisasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.³

Salah satu pendekatan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan berkualitas tersebut adalah dengan inklusi sosial. Inklusi sosial hadir sebagai jawaban terhadap masyarakat yang merasa dirinya terpinggirkan dan memberikan kesempatan belajar yang sama ketika mengakses pendidikan, sumber belajar, dan informasi tanpa adanya diskriminasi. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan 4 *SDG*, inklusi sosial menjadi konsep yang penting dalam proses pencapaian pendidikan berkualitas yang luas dan adil serta membuka kesempatan belajar *lifelong* bagi semua lapisan masyarakat.

Salah satu lembaga yang memiliki peran aktif dalam mengembangkan konsep inklusi sosial dalam bidang pendidikan adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum memiliki peran krusial dalam bidang pendidikan karena menjadi elemen utama yang bertugas untuk penyediaan sumber belajar yang beragam. Kehadiran perpustakaan dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif dan menumbuhkan budaya literasi dan berpikir kritis. Selain itu, perpustakaan merupakan sarana dalam mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) untuk seluruh elemen

² UNICEF, “Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas,” UNICEF, 2025. Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 dari situs <https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/>.

³ Siahaan, Juli Arianti, and Thalib, “Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4.”

masyarakat.⁴ Perpustakaan juga berperan penting dalam penyediaan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perubahan dan menciptakan peluang kepada masyarakat untuk lebih berkarya.

Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda adalah booklet yang diterbitkan oleh International Federation of Library Associations and Institutional (IFLA) di tahun 2016 yang di dalamnya menjabarkan dengan tegas peran perpustakaan dalam membantu mewujudkan *Sustainable Development Goals*, salah satunya SDG 4 dengan menyediakan staff profesional sehingga dapat menunjang terciptanya kegiatan literasi dan pembelajaran sepanjang hayat, memberikan akses informasi, menyediakan ruang inklusi di mana biaya bukan lagi sebuah penghalang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.⁵

Sebagai negara yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga turut andil berkomitmen dalam mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, Indonesia membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas) dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta. Komitmen tersebut dimuat pada Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 yang menjadi landasan hukum pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 17 tujuan dari *SDG*.⁶ Pada Peraturan Presiden ini

⁴ I Nengah Sutrisna Jaya, “Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Bagi Pemustaka” 4, no. 2 (2024): 1–14.

⁵ IFLA, “*Libraries Can Drive Progress across the Entire UN 2030 Agenda*,” *Access and Opportunity for All: How Libraries Contribute to the United Nations 2030 Agenda*, 2016, diakses pada tanggal 21 Juli 2025 dari situs <https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert.pdf>

⁶ “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (2017).

mengatur kerangka kerja, koordinasi, serta pelibatan partisipatif seluruh unsur baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat.

Dalam konteks daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menyelenggarakan berbagai program yang berkaitan dengan akses informasi, literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu program yang dijalankan adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program tersebut telah dilaksanakan di Aceh sejak tahun 2018 dan kemudian diperluas hingga ke perpustakaan kabupaten/kota serta perpustakaan desa. Pelaksanaan TPBIS diarahkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, serta mendorong perpustakaan menjadi pusat kegiatan dan pembelajaran masyarakat.⁷

Selain melalui TPBIS, DPKA juga melaksanakan berbagai kegiatan penguatan literasi dan kapasitas pengelola perpustakaan. Pada tahun 2025, misalnya, DPKA melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang melibatkan pengelola perpustakaan gampong. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses informasi, menjadikan perpustakaan sebagai *community learning centre*, serta mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pembelajaran. DPKA juga menyebutkan bahwa penguatan literasi dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun program literasi bagi orang

⁷ Humas Arpus, "Perpustakaan Nasional Dan DPKA Berkomitmen Untuk Transformasi Perpustakaan Yang Berkelanjutan," Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2022, <https://arpus.acehprov.go.id/?p=3626>.

dewasa, sehingga sasaran pengembangan literasi tidak hanya terbatas pada kelompok usia sekolah.⁸

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, DPKA juga melakukan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi. Salah satunya melalui penerapan aplikasi INLISLite dan sosialisasi e-book yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada pemustaka. Selain itu, DPKA juga memiliki layanan perpustakaan digital iPustaka Aceh yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan secara digital.⁹

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa fungsi perpustakaan di Aceh tidak hanya diarahkan pada penyediaan bahan bacaan, tetapi juga mencakup penyediaan akses informasi, pengembangan kemampuan literasi, pembelajaran masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki keterkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) yang menekankan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Meskipun demikian, keberadaan berbagai program tersebut belum menunjukkan bahwa seluruh program telah direncanakan dan dilaksanakan dengan menjadikan SDG 4 sebagai acuan secara eksplisit. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana peran

⁸ Humas Arpus, “Kepala DPKA: Penguatan Literasi Salah Satu Aspek Pengurangan Kemiskinan,” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025, https://arpus.acehprov.go.id/?p=4526&utm_source.

⁹ Humas Arpus, “DPKA Tingkatkan Aplikasi Inlislite Dan Sosialisasi E-Books Dikabupaten Aceh Tengah,” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023, https://arpus.acehprov.go.id/?p=4065&utm_source.

DPKA dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4 serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) hingga saat ini belum memiliki dokumen kebijakan resmi yang secara eksplisit menjadikan SDG 4 sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program. Meskipun demikian, keterkaitan DPKA dengan kerangka SDG dapat ditelusuri melalui jalur kelembagaan: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebagai Gembang yang menaungi seluruh perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, telah mengadopsi SDGs sebagai salah satu acuan dalam arah kebijakan perpustakaan nasional. Dengan posisi DPKA sebagai bagian dari struktur pembinaan perpustakaan yang berada di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional, maka secara tidak langsung program-program yang dijalankan DPKA turut berada dalam pencapaian SDG, sekalipun keterkaitan tersebut belum dituangkan secara formal dalam dokumen perencanaan di tingkat daerah. Kesenjangan antara praktik program yang secara substantif telah mendukung SDG 4 dengan ketiadaan dokumentasi formal inilah yang menjadi celah dan nilai penting dari penelitian ini.

Maka dari itu, sesuai permasalahan telah disebutkan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran dan Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan Program Perpustakaan dengan SDGs (*Sustainable Development Goal 4*)” di mana penelitian ini akan melihat kesinambungan program perpustakaan dengan tujuan 4 SDG Gembangna berkualitas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, ada dua rumusan masalah yang dikaji, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs (*Sustainable Development Goal 4*)”?
2. Apa saja tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi Peran Dan Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs (*Sustainable Development Goal 4*).
2. Untuk mengetahui tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teori
 - a. Memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan.
 - b. Dapat memberikan bahan rujukan kepada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti: Semakin paham dengan *Sustainable Development Goals* dan upaya penerapannya di bidang pendidikan.
- b. Bagi Perpustakaan: Hasil dari penelitian dapat menjadi gambaran ke perpustakaan dalam melihat sejauh mana peran perpustakaan dalam mendukung pencapaian *sustainable development goals* di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

a) Peran

Menurut Soekanto, peran merupakan hak dan kewajiban yang dilaksanakan ketika individu memiliki sebuah kedudukan atau status. Apabila individu tersebut menjalankan, maka ia telah melakukan sebuah peranan. Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa peran adalah pola perilaku dari individu yang memiliki posisi dalam satu organisasi atau sistem. Sedangkan menurut Andri dan Herawan, peran adalah tindakan yang dijalankan oleh lembaga dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan fungsi lembaga tersebut.¹⁰

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan dampak sesuai dengan tujuan individu/lembaga

¹⁰Andri Purwanugraha et al., "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>.

tersebut. Dalam penelitian ini, konsep peran digunakan untuk melihat tindakan dan kontribusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam melaksanakan program perpustakaan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4). Peran tersebut dilihat melalui berbagai upaya yang dilakukan DPKA dalam menyediakan program literasi, memperluas akses informasi dan pembelajaran, menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok usia, serta menciptakan layanan dan kegiatan perpustakaan yang inklusif.

b) Tantangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantangan berasal dari kata ‘tantang’ yang berarti melawan, menghadapi. Tantangan adalah sesuatu yang merangsang tekad untuk mengatasi masalah.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, tantangan dimaknai sebagai kondisi atau situasi yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam melaksanakan dan mengembangkan program perpustakaan yang berkaitan dengan SDG 4 serta memerlukan upaya tertentu untuk mengatasinya. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perkembangan teknologi digital, serta kondisi dan kesadaran masyarakat terhadap perpustakaan.

c) Perpustakaan Umum

Di dalam Undang-undang No 47 tahun 2007, perpustakaan umum didefinisikan sebagai perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat secara

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III,” 2025, Diakses pada tanggal 12 Maret 2026 dari situs https://kbbi.web.id/sinergi#google_vignette.

luas untuk mewadahi pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan ras, agama, umur, jenis kelamin, suku, dan status sosial-ekonomi.¹² Dalam panduan IFLA/UNESCO Publikasi 147, perpustakaan umum merupakan instansi yang didirikan oleh masyarakat baik melalui pemerintahan kota, provinsi, nasional, maupun lembaga kemasyarakatan untuk penyediaan akses informasi, ilmu pengetahuan, dan karya imajinasi di berbagai sumber daya tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, bahasa, usia, jenis kelamin, keterbatasan fisik, status ekonomi, lapangan kerja, dan status pendidikan¹³. Perpustakaan umum adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan untuk pemenuhan informasi, pengetahuan, teknologi, dan budaya bagi masyarakat umum guna meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat¹⁴.

Maka dari itu, perpustakaan umum adalah instansi pendidikan yang menyediakan sumber belajar bagi segala kalangan masyarakat sepanjang hayat tanpa membeda-bedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

d) Program Perpustakaan

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rancangan mengenai tujuan serta usaha yang akan dilaksanakan.¹⁵ Program perpustakaan merupakan

¹² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, vol. 7, 2007.

¹³ Ari Suryadi, "Karakteristik Pengguna Dan Kebutuhan Informasinya Di Perpustakaan Umum," *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 6, no. 1 (n.d.).

¹⁴ Rahmat Kautsar, Hamidi Ilhami, and Muhammad Nur Effendi, "Preservasi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Umum Kota Banjarmasin" 10, no. 1 (2022): 49–58.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III," 2025, Diakses pada tanggal 12 Maret 2026 dari situs https://kbbi.web.id/sinergi#google_vignette.

alur kegiatan yang direncanakan, diorganisir, berkepanjangan yang dilaksanakan oleh perpustakaan, baik itu acara, layanan, maupun proyek khusus, untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, literasi, dan rekreasi pemustaka.

e) *Sustainable Development Goal 4*

Sustainable Development Goals adalah program yang diadopsi oleh United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk memutuskan rantai kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Tujuan yang ingin dihadirkan yaitu untuk mencapai tujuan bersama yang universal, yang mampu menjaga tatanan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.¹⁶ *Sustainable Development Goals* memiliki tujuh belas tujuan, salah satunya adalah SDG 4 yang menegaskan pendidikan berkualitas mendukung pembangunan berkelanjutan, dan tujuan ini secara nyata memerlukan peran dari perpustakaan umum.

Dalam konteks penelitian ini, SDG 4 menjadi dasar konseptual untuk melihat bagaimana perpustakaan umum, sebagai lembaga yang memberikan akses informasi dan ruang pembelajaran untuk masyarakat, dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi, kemampuan belajar, dan kualitas pendidikan masyarakat secara berkelanjutan. Pembatasan ini diambil karena fokus penelitian adalah peran dan tantangan DPKA dalam konteks 11embanguna dan literasi, sehingga pembahasan, kajian 11embang, maupun analisis data pada bab-bab selanjutnya

¹⁶ Nations United Development Programme, “Sustainable Development Goals” Diakses pada tanggal 12 Maret 2026 dari situs <<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>> .

hanya diarahkan pada keterkaitan program perpustakaan dengan target-target di bawah SDG 4.

f) Sinergi

Menurut Hampden-Turner (1990), sinergi merupakan suatu proses yang lahir dari keterlibatan berbagai aktivitas yang saling berjalan secara terpadu sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Sinergi tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama, tetapi juga sebagai hasil interaksi dialogis antara berbagai sumber pengetahuan, pengalaman, maupun perspektif yang berbeda. Melalui proses tersebut, berbagai pengetahuan dihimpun dan diintegrasikan sehingga melahirkan nilai, ide, atau solusi baru yang tidak dapat dihasilkan secara terpisah.¹⁷

Hartanto (1996) menjelaskan bahwa sinergi adalah terbentuknya suatu gagasan baru yang berasal dari perpaduan berbagai pemikiran dan kontribusi banyak pihak. Dalam suatu organisasi, sinergi yang efektif tercermin melalui kemampuan anggota untuk menggabungkan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan, didukung oleh hubungan yang dilandasi kepercayaan dan sikap saling mendukung. Kondisi tersebut memungkinkan terciptanya inovasi yang memberikan manfaat dan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, munculnya gagasan baru tidak dapat dipisahkan dari adanya kerja sama yang efektif dan partisipasi aktif setiap unsur dalam organisasi.¹⁸

37. ¹⁷ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif , Intensitas," No. 55 (2006): 219–

¹⁸ Sulasmi.

Berdasarkan uraian para ahli, dalam penelitian ini sinergi dimaknai sebagai proses kolaborasi dan penyelarasan peran antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan berbagai pemangku kepentingan, program, serta sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan SDG 4 melalui penyediaan layanan perpustakaan yang inklusif, penguatan literasi, dan pembelajaran sepanjang hayat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian peneliti, bahwasanya terdapat beberapa jenis penelitian relevan dengan topik yang peneliti kaji, yang berkaitan dengan kajian peran perpustakaan. Meski memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Elvy Suprianingrum dan Heriyanto pada tahun 2024 dengan judul artikel jurnal “Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Implementasi *Sustainable Development Goals 4*” dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi SDGs 4. Penelitian ini dilakukan di empat perguruan tinggi, di antaranya adalah Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Hasil dari penelitian ini adalah empat perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia berkontribusi dalam *sustainable development goals 4* adalah dengan penyediaan akses informasi kepada pemustaka, program kerja sama perpustakaan dengan pihak-pihak lain yang juga turut andil dalam mendukung implementasi SDGs 4, serta mengadakan program pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kendala mengilustrasikan tentang kegiatan atau kebijakan yang ada di perpustakaan

yang dapat menghambat perpustakaan dalam memberikan dukungan dalam implementasi SDGs 4.¹⁹

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvy Suprianingrum dan Heriyanto, yaitu sama-sama menunjukkan peran perpustakaan dalam mendukung perwujudan *sustainable development goals* khususnya pada tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas.. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian oleh Elvy dan Heriyanto berfokus perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran perpustakaan umum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurmila Ramadhani., dkk, dengan judul “Analisis Kebijakan Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)” di tahun 2026 dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan tujuan 10 (Pengurangan Kesenjangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusi sosial telah diimplementasikan secara terencana melalui transformasi peran perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kompetensi pustakawan, penyediaan layanan berbasis kebutuhan, serta pelaksanaan berbagai program literasi dan pelibatan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah kebijakan inklusi

¹⁹ Elvy Suprianingrum and Heriyanto, “Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Implementasi Sustainable Development Goal 4,” *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 42, no. 1 (2021): hlm. 153, <https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.732>.

sosial perpustakaan berperan secara signifikan terhadap pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 10 (Pengurangan Kesenjangan), namun memerlukan penguatan dukungan struktural, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.²⁰

Persamaan penelitian oleh Nurmila Ramadhani., dkk, dengan penelitian penulis adalah sama-sama menunjukkan peranan perpustakaan dalam mencapai SDGs. Perbedaan yang terlihat adalah penelitian tersebut berfokus pada kebijakan dan menilai dari dua tujuan SDG yaitu SDG 4 pengurangan kesenjangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran program perpustakaan yang mendukung SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 oleh Rahmad Mangaraja Pohan., dkk, dengan judul “Manajemen Perpustakaan Sebagai Pendorong Pendidikan Berkualitas Di Indonesia Menuju SDGs 2030”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen perpustakaan sebagai penyokong terwujudnya pendidikan berkualitas di Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen perpustakaan yang efektif meliputi perencanaan koleksi, pengembangan layanan, pelatihan pustakawan, dan digitalisasi memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi, pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), serta pencapaian target SDGs 2030.²¹

²⁰ Nurmila Ramadhani et al., “Analisis Kebijakan Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Enrekang Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)* 4, no. 2 (2026): 1–12.

²¹ Rahmad Mangaraja Pohan, Sri Rohyanti Zulaikha, and Cut Afrina, “Manajemen Perpustakaan Sebagai Pendorong Pendidikan Berkualitas Di Indonesia Menuju SDGs 2030,” *JIPIS (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam)* 4, no. 2 (2025): 125–40.

Persamaan penelitian oleh Rahmad Mangaraja Pohan., dkk dengan penelitian penulis adalah sama-sama menunjukkan peranan perpustakaan dalam mencapai SDGs namun yang membedakan adalah penelitian tersebut cenderung meneliti dari aspek kegiatan manajemen seperti perencanaan koleksi, pengembangan layanan, pelatihan pustakawan, dan digitalisasi. Sedangkan penulis, berfokus pada aspek program yang dijalankan oleh perpustakaan dalam mendukung pendidikan berkualitas atau SDG 4.

B. Peran Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum biasanya seringkali digambarkan sebagai “Universitas Rakyat” atau “Universitas Masyarakat”. Itu dikarenakan perpustakaan ini menyediakan ilmu pengetahuan, akses informasi, budaya, dan teknologi sebagai sumber belajar untuk segala kelas masyarakat. Perpustakaan umum dinilai sebagai perpustakaan yang demokratis karena menyediakan kebutuhan masyarakat tanpa membedakan latar belakang individu. Perpustakaan umum merupakan satu-satunya jenis perpustakaan yang masih dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan desa, taman baca rakyat, dan perpustakaan keliling.²²

Sutarno dalam bukunya menyatakan peran perpustakaan secara umum memiliki empat peran strategis. Pertama, perpustakaan sebagai media yang menghubungkan sumber informasi dalam koleksi dengan pemakainya. Kedua, perpustakaan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antar sesama pemakai maupun antara penyelenggara perpustakaan dengan pemustaka.

²² Sutarno NS, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006).

Ketiga, perpustakaan berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi pemustaka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keempat, perpustakaan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan manusia.²³

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada peran perpustakaan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator sebagaimana tercantum dalam peran ketiga. Ketiga peran tersebut dipilih karena paling relevan dan dapat diidentifikasi secara langsung melalui program-program yang dijalankan DPKA dalam kaitannya dengan SDG 4. Selain itu, pemilihan ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memfokuskan pada elemen teori yang paling sesuai dengan konteks dan fokus penelitian.

Sebagai fasilitator, perpustakaan menyediakan sumber informasi yang relevan dan fasilitas yang memudahkan pemustaka dalam mengakses pengetahuan. Sebagai motivator, perpustakaan mendorong dan meningkatkan motivasi pemustaka dalam pencarian ilmu melalui penyelenggaraan kegiatan yang mendukung literasi. Sebagai mediator, perpustakaan menjembatani kebutuhan pemustaka dalam mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta membantu pencarian informasi atau referensi yang dibutuhkan.²⁴ Perpustakaan sebagai mediator, fasilitator, dan motivator bagi pemustaka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sebagai pengelola perpustakaan, pustakawan tidak hanya melakukan tugas dari balik meja, tetapi juga aktif sebagai fasilitator dan

²³ Sutarno NS, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006).

²⁴ NS, *Perpustakaan Dan Masyarakat*.

motivator. Pustakawan memegang peran krusial dalam meningkatkan motivasi pencarian ilmu dengan cara menyediakan sumber informasi yang relevan, mengadakan kegiatan yang mendukung literasi, serta membantu pencarian informasi atau referensi.²⁵

Ketiga peran perpustakaan menurut Sutarno tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk melihat kesesuaiannya dengan tiga indikator peran perpustakaan dalam mendukung SDG 4 menurut kerangka IFLA, yaitu literasi dan pembelajaran sepanjang hayat, akses informasi, serta inklusi sosial dan aksesibilitas. Peran perpustakaan dalam literasi, informasi, dan pembelajaran sepanjang hidup.²⁶ Berikut akan diperjelas tentang tiga indikator peran perpustakaan dalam mendukung SDGs 4 dalam kerangka IFLA.

- a. Akses ke Sumber Informasi yang beragam. Salah satu peran utama perpustakaan dalam masyarakat adalah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan tersedianya koleksi yang luas dan bervariasi, seperti buku, majalah, jurnal, dan koleksi digital, perpustakaan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya ketersediaan koleksi yang sangat luas, perpustakaan akan memberikan akses yang mudah untuk

²⁵ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Peran Perpustakaan Dalam Mendukung Pembelajaran Berbasis Informasi : *Studi Literature*," *Edusola: Journal Education, Sociology and Law* 2, no. 4 (2024): 306–312.

²⁶ Kartika Sari Rohmaniyah, "Peran Perpustakaan Dalam Mengembangkan Literasi Dan Pengetahuan Masyarakat," *DE FACTO: Journal Of International Multidisciplinary Science* 2, no. 02 (2024): 40–51, <http://azramedia-indonesia.com/index.php/defacto/indexDOI:https://doi.org/10.62668/defacto.v2i01.1026>.

masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap perpustakaan karena menyediakan sumber informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

- b. Program Literasi untuk Semua Usia, seperti *storytime* anak-anak, klub membaca untuk remaja, dan kelas literasi digital untuk dewasa. Dampak adanya program literasi yang dilaksanakan di perpustakaan adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman terhadap sumber informasi yang terpercaya, serta pengelolaan informasi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengambilan keputusan.²⁷
- c. Dukungan Pembelajaran Seumur Hidup (*Lifelong Learning*). Perpustakaan dapat membantu mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat dengan memberikan akses seminar, kursus *online*, atau lokakarya, yang meliputi berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan pribadi. Dengan demikian, perpustakaan dapat membantu masyarakat belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

C. Tantangan Perpustakaan Umum

Pergeseran paradigma perpustakaan dari yang semula hanya sebatas penyimpanan buku, menjadi instansi yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan literasi, dan promosi inklusi sosial menjadikan perpustakaan umum memiliki tantangan yang perlu diatasi. Secara umum tantangan

²⁷ S. Jaya, I Nengah, "Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Bagi Pemustaka," *Msip* 4, no. 2 (2024): 70–80.

pengelolaan perpustakaan bisa dilihat dari tantangan internal, kelembagaan dan sosial, dan tantangan eksternal. Berikut akan dijelaskan ketiga faktor tersebut.

a) Tantangan Internal

Ketersediaan Sumber Daya Manusia. Di Indonesia, masih banyak banyak staf perpustakaan yang mengalami teknofobia, di mana kesulitan ketika adaptasi dengan teknologi baru, padahal pemustaka juga kurang mendapatkan pelatihan dalam mengoptimalkan layanan di perpustakaan.²⁸ Maka dari itu penting adanya pengelolaan SDM yang efektif, mencakup penyusunan program pelatihan dan *worksop*, pemberian kesempatan studi lanjut, serta pembinaan kompetensi yang berkelanjutan supaya tenaga perpustakaan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan menciptakan inovasi layanan.²⁹

Anggaran Masalah utama yang saat ini dihadapi oleh perpustakaan adalah terbatasnya anggaran dalam hal pengembangan perpustakaan ke arah yang lebih modern, terutama pemenuhan teknologi informasi, mendapatkan akses ke sumber daya elektronik, dan pelatihan staf. Bahkan sebagian besar anggaran perpustakaan masih digunakan untuk kebutuhan operasional rutin, bukan untuk menaikkan kualitas

²⁸ Jamridafrizal, Zulfitri, and Muhammad Farid Wajdi, *Perpustakaan Sebagai Institusi: Perspektif Organisasi Dan Regulasi*, ed. M.Kom Andi Saputra, S.Kom., *Perpustakaan Sebagai Institusi Perspektif Organisasi Dan Regulasi*, 1st ed. (Serang: Yayasan Laksita Indonesia, 2024).

²⁹ Asma Mulyana, "Manajemen Sumberdaya Manusia Perpustakaan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan" 2, no. 1 (2026): 21–31.

teknologi atau layanan baru.³⁰ Dokumen IFLA Vision tahun 2019 menyatakan bahwa perpustakaan harus memastikan infrastruktur, alat, dan pendanaan agar bisa memanfaatkan peluang inovasi digital yang sifatnya mendesak. Mengalokasikan dana untuk dampak nyata adalah tantangan penting perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan komunitas.³¹

b) Tantangan Sosial dan Kelembagaan

Tantangan sosial dan kelembagaan terdiri dari dua yaitu keadilan akses dan kolaborasi lemah. Berikut penjelasannya.

Keadilan Akses. Saat ini, tidak hanya sebagai instansi yang menyediakan akses informasi, tetapi perpustakaan umum juga sebagai ruang publik yang punya tanggung jawab sosial dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan hak-hak untuk mereka. McCook and Phenix menyebutkan bahwa perpustakaan berkemungkinan memiliki dampak negatif terhadap keadilan sosial apabila pelayanan berbeda, akses terbatas, kurangnya bahan pustaka yang sesuai, dan peraturan yang diskriminatif bagi sebagian masyarakat. Jaeger, Taylor, dan Gorham memberikan penekanan pada perpustakaan bahwa perannya harus bisa

³⁰ Ilhami Ilhami et al., “Analisis Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Perpustakaan Di Era Digital,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i2.284>.

³¹ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), “Global Vision Report Summary: Top 10 Highlights and Opportunities” (The Hague, 2018), <https://www.ifla.org/globalvision/>.

menjadi jembatan bagi kesenjangan dan dapat memajukan inklusi, serta menjamin tersedianya akses pengetahuan bagi siapa saja.³²

Menurut Standar Nasional Perpustakaan dan PP. NO. 24 Tahun 2014, perpustakaan adalah penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai keajiban untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif, yang mewajibkan perpustakaan memperhatikan kebutuhan pemustaka dengan kelainan fisik, intelektual, mental, emosional, dan/atau sosial.

Kolaborasi Lemah. IFLA pada dokumen global vision 2018 mengatakan bahwa memahami dan mengatasi hambatan nyata terhadap kolaborasi akan membantu mengakhiri kecondongan bekerja secara terpisah, dan mewujudkan visi bidang perpustakaan yang bersatu.³³ Adapun aktor yang terlibat dalam kolaborasi perpustakaan dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bisa dilakukan dengan pihak pemerintahan maupun pihak non-pemerintahan.³⁴

c) Tantangan Eksternal

Platform digital seperti Wikipedia, Google, dan layanan *e-book* memberikan penawaran akses informasi yang cepat dan mudah, pemustaka mudah untuk berpaling dari perpustakaan konvensional. Maka

³² Jamridafrizal, Zulfitri, and Wajdi, *Perpustakaan Sebagai Institusi: Perspektif Organisasi Dan Regulasi*.

³³ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), "Global Vision Report Summary: Top 10 Highlights and Opportunities."

³⁴ Lailathul Indra Sari, "Tata Kelola Kolaborasi Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Di Kabupaten Magelang," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 1, no. 1 (2024): 93–110.

dari itu, keberadaan perpustakaan harus tetap relevan dengan memperbarui koleksi digital, memberikan akses digital, dan menggunakan teknologi terkini.³⁵

Tantangan Kesadaran Agenda Global. Setiap orang di bidang ini perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan advokasi untuk meningkatkan persepsi dan pada akhirnya mencapai tujuan kami. Setiap pustakawan adalah seorang advokat.³⁶ Salah satu tantangan yang masih dihadapi perpustakaan dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah belum meratanya pemahaman mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Meskipun sebagian perpustakaan sudah mengenal konsep SDGs, penerapannya dalam program dan layanan perpustakaan masih belum maksimal. Selain itu, kurangnya kegiatan advokasi juga membuat peran perpustakaan dalam mendukung SDGs belum banyak diketahui, baik oleh masyarakat maupun pihak pengambil kebijakan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu meningkatkan kerja sama, memperkuat upaya sosialisasi, dan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.³⁷

³⁵ Ilhami Ilhami et al., “Analisis Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Perpustakaan Di Era Digital,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i2.284>.

³⁶ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), “Global Vision Report Summary: Top 10 Highlights and Opportunities.”

³⁷ Leila Sonkkänen, “Bringing Environmental Awareness of Public Libraries to the 2020s,” in *ENSULIB Satellite Meeting, IFLA WLIC 2022* (Cork, Ireland: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2022), 22–23.

Berdasarkan penjabaran tersebut, tantangan perpustakaan bukan hanya berasal dari faktor internal dan eksternal melainkan juga tantangan dari kelembagaan dan sosial yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam pelaksanaan program. Maka dari itu, perlu adanya upaya strategis supaya perpustakaan dapat memaksimalkan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan.

D. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Era *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dimulai pada tahun 2000 berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Dalam kurun waktu 15 tahun, MDGs menyongsong kemajuan di bidang-bidang krusial, yaitu mengurangi kemiskinan, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang diperlukan, penurunan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu secara signifikan. MDGs juga aktif dalam memulai gerakan untuk pensisikan gratis, serta menciptakan peranan besar dalam memerangi HIV/AIDS dan penyakit lain seperti malaria dan tuberkolosis. Keberhasilan MDGs memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam mencapai tujuan-tujuan baru. Meskipun demikian, masih ada jutaan orang yang belum merasakan keberhasilan dari program ini. Konsep SDGs kemudian lahir untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai yaitu memulai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan baru dan seruan mendesak untuk membawa dunia ke jalur yang lebih berkelanjutan.³⁸

³⁸ Akselerator SDG, “*Sustainable Development Goals: Latar Belakang Tujuan*,” UNDP , Diakses pada tanggal 21 Juli 2025 dari situs <<https://www.undp.org/sdg-accelerator/background-goals>>

Sustainable development goals tercetus pada Koferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012.³⁹ Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara menyepakati dokumen SDGs yang diadaptasi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Kemudian pada tanggal 25-27 September 2015 diadakan pertemuan lanjutan atau seremoni pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri 193 negara di markas besar PBB, tepatnya di New York, Amerika Serikat, dilanjutkan dengan era *Sustainable Development Goals*.⁴⁰

SDGs dirancang secara partisipatif, artinya perancangan SDGs tidak hanya melibatkan instansi pemerintahan saja, melainkan juga memberi kesempatan pada non pemerintah dalam merancang konsep ini, yang terdiri dari *civil society organization*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia telah ikut andil terhadap Tujuan dan Target SDGs.⁴¹ Tujuan yang ingin dihadirkan adalah untuk mencapai tujuan bersama yang universal, yang mampu menjaga tatanan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketika merawat tatanan ketiga

³⁹ Akselerator SDG, "*Sustainable Development Goals: Latar Belakang Tujuan*," UNDP, Diakses pada tanggal diakses 20 Juli 2025] dari situs <<https://www.undp.org/sdg-accelerator/background-goals>> [diakses 20 Juli 2025].

⁴⁰ Maurina Suryaning Pertiwi, "*Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Perwujudan Perdamaian Dunia*," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 86, <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104>.

⁴¹ Bapedda, "Sejarah Singkat Adanya SDGs," Bapedda Kalimantan Barat, [diakses 20 Juli, 2025, <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>.

dimensi pembangunan tersebut, SDGs memiliki lima asas utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian.

a) Tujuan Sustainable Development Goals

Tujuan yang ingin dihasilkan dari SDGs adalah menciptakan tujuan bersama yang universal yang mampu menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk itu, SDG mempunyai lima pilar utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan untuk meraih tiga tujuan utama di tahun 2030 nantinya, yaitu memutuskan kemiskinan, meraih kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.⁴²

Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

- a. Memutus Kemiskinan. Memutus rantai kemiskinan dari berbagai pelosok dunia.
- b. Tidak ada Kelaparan. Menuntaskan fenomena kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, serta menyokong pengelolaan pertanian yang lebih baik secara berkelanjutan.
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Memberikan jaminan untuk hidup yang sehat serta menyokong hidup yang penuh kesejahteraan bagi segala elemen masyarakat semua usia.

⁴²Pertiwi, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Perwujudan Perdamaian Dunia."

- d. Pendidikan Berkualitas. Memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil, serta mendorong terbukanya kesempatan untuk belajar sepanjang hayat bagi semua orang.
- e. Kesenjangan Gender. Memberikan lingkungan tanpa diskriminasi gender serta pembinaan untuk anak-anak perempuan dan wanita.
- f. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin dan memastikan pengelolaan dan tersedianya air yang bersih dan penjagaan lingkungan yang sehat untuk setiap orang.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau. Jaminan sarana kepada sumber energi yang terpercaya, terjangkau, berkelanjutan dan *modern* yang ditujukan bagi seluruh elemen masyarakat.
- h. Ekonomi yang bertumbuh dan Pekerjaan yang Layak. Menyongsong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang memadai bagi setiap individu.
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kuat, menyokong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta terciptanya berbagai inovasi.
- j. Meminimalisir Kesenjangan. Menurunkan tingkat disparitas baik di internal sebuah negara maupun di antara berbagai negara yang ada di dunia.
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Menciptakan pemukiman serta berbagai kota yang ramah bagi semua orang, berkualitas, tanggung dan berkelanjutan.
- l. Tanggung Jawab Konsumsi dan Produksi. Memastikan ketahanan konsumsi dan pola produksi.

- m. Aksi Terhadap Iklim. Bergerak sigap dalam menghadapi *climate change* dan menganalisis dampaknya.
- n. Kehidupan Bawah Laut. Merawat dan menjaga ekosistem laut dan kehidupan sumber daya laut untuk pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.
- o. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlanjutan ketergunaan ekosistem darat, minimalisir tanah yhang gersang, memulihkan degradasi tanah, mengelola hutan, memerangi penebangan liar, dan mengehtikan kerugian keanekaragaman hayati.
- p. Lembaga Peradilan yang Tangguh dan Kedamaian. Menciptakan perdamaian yang luas termasuk masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, memberikan akses untuk keadilan bagi setiap orang termasuk instansi dan menjadi penanggung jawab bagi semua kalangan, serta menciptakan instansi yang akuntabel, efektif, dan inklusif.
- q. Mencapai Tujuan dengan Kemitraan. Mempererat penerapan dan mengidupatkan kerjasama dunia demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.⁴³

Penelitian ini akan terpusat pada tujuan keempat dari SDG. *SDG 4* yaitu pendidikan berkualitas adalah memastikan pendidikan inklusif dan adil serta menjadi sarana dalam pembelajaran seumur hidup dan berkelanjutan bagi semua orang.⁴⁴ Melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), PBB

⁴³ *Department of Economic and Social and Sustainable Development, "The 17 Goals," United Nations*, Diakses pada tanggal diakses 20 Juli 2025 dari situs <<https://sdgs.un.org/goals>> .

⁴⁴ Departemen Ekonomi dan Sosial, "*Sustainable Development Goal 4*," *United Nations*, n.d., <https://sdgs.un.org/goals/goal4>.

menyatakan dalam Agenda 21 bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dimana pendidikan lebih dari sekedar pengetahuan dan skills tetapi juga meliputi pandangan yang mendunia, nilai-nilai, perspektif, dan aspirasi.⁴⁵ SDG 4 memiliki beberapa target, diantaranya:

- a. Target 4.1 Pendidikan dasar dan menengah gratis. Target ini memastikan anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan dasar yang setara dan berkualitas tanpa dipungut biaya.
- b. Target 4.2 Akses yang sama terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Pada tahun 2030, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, mempunyai akses kepada pengasuhan anak usia dini pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga nantinya siap untuk menjalankan pendidikan dasar.
- c. Target 4.3 Akses yang sama kepada pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- d. Target 4.4. Meningkatkan jumlah keterampilan orang yang relevan untuk kesuksesan finansial. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki

⁴⁵ Siahaan, Juli Arianti, and Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4."

keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

- e. Target 4.5 Hilangkan semua diskriminasi dalam pendidikan. Pada tahun 2030, menghilangkan ketidaksetaraan antar gender dalam pendidikan, dan memberikan akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- f. Target 4.6 Literasi dan numerasi universal. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi
- g. Target 4.7 Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, promosi budaya damai, menghargai multikultural, kewarganegaraan global, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan..
- h. Target 4 A Membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman. Menciptakan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, ramah anak, serta memberikan lingkungan belajar yang anti kekerasan, aman, efektif, dan inklusif untuk semua.

- i. Target 4 b Pemerataan beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang. Pada tahun 2030, perluasan beasiswa bagi negara berkembang secara merata, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk dalam bidang, program teknik, pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program rekayan dan ilmiah, pada negara maju dan negara berkembang lainnya.
- j. Target 4 c Peningkatan kualitas guru di negara-negara berkembang. Di tahun 2030, secara signifikan meningkatkan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang.⁴⁶

SDG 4 menegaskan pendidikan berkualitas mendukung pembangunan berkelanjutan, dan tujuan ini secara nyata memerlukan peran dari perpustakaan umum. Dalam konteks penelitian ini, SDG 4 menjadi dasar konseptual untuk melihat bagaimana perpustakaan umum, sebagai lembaga yang memberikan akses informasi dan ruang pembelajaran untuk masyarakat, dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi, kemampuan belajar, dan kualitas pendidikan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendidikan berkualitas mempunyai peran penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karena dengan pendidikan, masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam meningkatkan kualitas hidup.

⁴⁶ Sekretariat Nasional SDGs, "Goal 4: Pendidikan Berkualitas," Bappenas, n.d., Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2026 dari situs <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>.

Maka dari itu, pendidikan berkualitas menjadi pendorong sasaran serta target dari program SDGs ini.⁴⁷

E. Peran Perpustakaan dalam Mendukung SDGs (Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda)

Dalam mendukung penerapan program SDGs, perpustakaan dapat memberikan akses informasi, sokongan untuk kegiatan literasi dan keterampilan TIK, dan akses ke ruang komunitas, sebagian contohnya adalah perpustakaan sebagai tempat penyimpanan informasi yang menunjang penyebaran informasi dan penelitian untuk pengambilan keputusan.⁴⁸ Banyak negara telah menetapkan perpustakaan sebagai tempat penyimpanan dokumen PBB, menjadikannya tempat penting untuk informasi tentang PBB dan SDGs.⁴⁹

Untuk menghubungkan peran perpustakaan yang telah dipaparkan di atas dengan *Sustainable Development Goal 4*, penelitian ini menggunakan kerangka yang dikeluarkan oleh International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dalam dokumen *Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda*. IFLA memiliki keterlibatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan pemahaman global tentang kekuatan perpustakaan sebagai mitra

⁴⁷ Department of Economic and Social and Sustainable Development, “Memastikan Pendidikan Berkualitas Yang Inklusif dan Adil Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua,” United Nations, Diakses 15 April 2026 dari situs <https://sdgs.un.org/goals/goal4#undefined>.

⁴⁸ Suhernik and Indah Rachma Cahyani, “Mewujudkan Airlangga University Library Sustainable Development Goals (SDGs),” *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* 10, no. 2 (2017): 83–93.

⁴⁹ Department of Economic and Social and Sustainable Development, “Contribution of Libraries to the SDGs,” United Nations, 2016, Diakses pada tanggal 25 Juli 2025 dari situs https://sdgs.un.org/partnerships/contribution-libraries-sdgs?utm_source.

34 pembangunan berkelanjutan *International Federation of Association and Institution* (IFLA) memiliki keterlibatan dengan organisasi internasional seperti *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk meningkatkan pemahaman secara global tentang kekuatan perpustakaan sebagai mitra pembangunan berkelanjutan.⁵⁰ Melalui dukungan organisasi seperti IFLA, perpustakaan di berbagai negara didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam implementasi SDGs, terutama melalui penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan keterampilan digital masyarakat.⁵¹

IFLA mengeluarkan kampanyenya sebagai bentuk dukungan terhadap SDGs, dalam dokumen yang berjudul *Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda*. Kampanye IFLA dalam mewujudkan SDGs berfokus kepada akses informasi dan pengetahuan serta kemampuan untuk menggunakannya sehingga dapat mendukung pembangunan dan kualitas hidup.⁵² Berikut merupakan peran perpustakaan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goal 4* pendidikan berkualitas berdasarkan dokumen *Libraries Can Drive Progress Across the Entire UN 2030 Agenda*.⁵³

- a) Literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan umum tidak pernah membedakan status penggunaannya. Perpustakaan dituntut aktif dalam

⁵⁰ “Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” IFLA, diakses Oktober 14, 2025, <https://www.ifla.org/units/sustainable-development/>.

⁵¹ Department of Economic and Social Development, “Contribution of Libraries to the SDGs.”

⁵² IFLA, “*Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda*,” no. March (2021): 1–32, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

⁵³ IFLA, “*Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda*,” no. March (2021): 1–32, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

mengoptimalkan penyediaan informasi. Itu artinya, perpustakaan perlu menciptakan motivasi dan inovasi untuk masyarakat agar berminat mengunjungi dan merasa betah menggunakan layanan perpustakaan.⁵⁴

- b) Akses informasi dan penelitian bagi akademis. Menurut Eskha, sebagai pusat media dan sarana akademisi, perpustakaan memberikan berbagai macam koleksi pustaka. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan berbagai informasi sesuai bidang keilmuan untuk tujuan akademisi maupun untuk menemukan bacaan yang bersifat menghibur.⁵⁵
- c) Ruang inklusif di mana biaya bukan penghambat bagi pengetahuan dan keterampilan baru. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang menyediakan layanan dengan menerapkan pendekatan sosial dan bertanggung jawab untuk mampu mendukung kebutuhan informasi masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa membedakan latar belakang masyarakat tersebut.⁵⁶ Perpustakaan dapat menjadi alternatif tempat belajar bagi anak putus sekolah, dan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah.⁵⁷

Pemilihan SDG 4 sebagai fokus penelitian didasarkan pada keterkaitan antara tujuan pendidikan berkualitas dengan fungsi dan peran perpustakaan sebagai lembaga

⁵⁴ Najla Rustam et al., “Perpustakaan Adalah Salah Satu Tempat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Library Is A Place For Long Life Learning),” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 3 (2023): 6–11.

⁵⁵ Endarti, “Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi,” *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan* 2, no. 1 (2022): 23–28, <https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>.

⁵⁶ Hidayat, Aisyah, and Ghassani, “Pemanfaatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Sesuai Dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030.”

⁵⁷ IFLA, “Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda,” no. March (2021): 1–32, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

yang mendukung proses pembelajaran masyarakat. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyediaan bahan bacaan, tetapi juga berperan dalam menyediakan akses informasi, mendukung kegiatan literasi, memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, serta menyediakan ruang belajar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai fungsi tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya pencapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas sebagaimana yang menjadi tujuan SDG 4. Oleh karena itu, SDG 4 dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkontribusi terhadap peningkatan literasi, pembelajaran, dan akses informasi masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Creswell memberikan definisi penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian ketika peneliti mengandalkan sudut pandang partisipan, merumuskan pertanyaan yang terbuka, pengumpulan data, dan kemudian dianalisis untuk menemukan tema dengan pelaksanaan penelitian yang cenderung subjektif dan memiliki bias tertentu. Pendekatan dilakukan dengan cara mengamati serta ikut serta dalam pengamatan ketika berada di lapangan.⁵⁸

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan situasi tertentu yang benar ada di dalam kehidupan nyata dengan tujuan untuk mengusut dan menganalisis fenomena, tentang apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu terjadi.⁵⁹ Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan harapan dapat menghasilkan gambaran secara lebih detail dan mendalam tentang peran dan tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam menjalankan program perpustakaan yang sejalan dengan *sustainable development goal 4* yaitu Pendidikan berkualitas.

⁵⁸ Allya Nur et al., “Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research,” 2026, 14330–44.

⁵⁹ Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*, ed. Surokim, *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*, 1st ed. (Jawa Timur, 2016), <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>. Hlm: 93

B. Fokus Penelitian

Fokus yang terdapat pada penelitian ini ada pada program perpustakaan yang berkaitan dengan peningkatan literasi, penyediaan akses informasi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 4.

C. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian harus sesuai dengan topik dan tujuan penelitian, dapat diakses, serta tersedianya narasumber.⁶⁰ Pada penelitian ini, fokusnya ada peran dan tantangan perpustakaan umum dalam mensinergikan program dengan tujuan SDG serta lokasi untuk melakukan penelitian adalah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh. Perpustakaan ini berlokasi di Jl. T. Nyak Arief, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga. Ketika menggunakan pendekatan kualitatif, maka subjek penelitian biasa disebut dengan istilah informan, yaitu individu yang menyampaikan data yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan topik penelitiannya.⁶¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik *purposive sampling* dalam menyeleksi informan, yaitu sampel sumber data yang diambil atas pertimbangan-

⁶⁰ Winda Kustiawan, Muhammad Daffa Raihan, and Muhammad Ibnu Thariq, "Pendekatan Metode Penelitian Lokasi Dan Waktu Informan Dan Penyusunan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025).

⁶¹ Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. Hlm: 130

pertimbangan tertentu, memiliki karakteristik yang diharapkan.⁶² Adapun menurut Maxwell, mengambil sampel dengan teknik *purposive* adalah cara di mana orang atau kejadian tertentu dipilih dengan sengaja untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan.⁶³

Maka, kriteria yang diterapkan untuk menetapkan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Informan ini dipilih dari pihak DPKA yang mempunyai jabatan serta terlibat secara langsung ketika mengelola program perpustakaan. Informan tersebut terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan program serta memiliki pemahaman terhadap kebijakan dan kegiatan perpustakaan. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat dalam perencanaan akan diambil sebanyak dua orang dan yang terlibat dalam pelaksanaan akan diambil sebanyak dua orang.

b. Informan dari Pemustaka

Pemilihan pemustaka sebagai informan bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang dari sisi pengguna layanan perpustakaan. Adapun kriteria pemustaka yaitu pernah menggunakan layanan perpustakaan, pernah terlibat kegiatan atau program perpustakaan, dan bersedia menjadi informan dalam penelitian. Untuk

⁶² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hlm: 73.

⁶³ Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.

menjangkau informasi, maka akan ada empat pemustaka yang diwawancarai, satu orang dewasa, satu laki-laki, dan dua perempuan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kordinator Seksi Bidang Layanan berjumlah satu orang.
- b. Koordinator Seksi Pengembangan Perpustakaan berjumlah satu orang.
- c. Pustakawan berjumlah dua orang.
- d. Pemustaka berjumlah empat orang.

Pemilihan informan yang telah disebutkan bertujuan untuk memperoleh data secara menyeluruh terkait peran dan tantangan dalam mensinergikan program perpustakaan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.⁶⁴ Menurut I Made Wiratha, objek penelitian adalah suatu ciri tertentu yang melekat pada subjek yang diteliti, di mana karakteristik tersebut dapat memiliki nilai, skor, maupun ukuran yang beragam antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain, 40embangu merupakan suatu konsep yang tidak hanya memiliki satu nilai tetap, melainkan dapat berubah-ubah tergantung pada unit atau individu yang menjadi sasaran pengamatan.⁶⁵ Maka dari itu, objek penelitian ini adalah program perpustakaan.

⁶⁴ Pusat Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III."

⁶⁵ Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*.hlm: 135

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang lumrah digunakan ketika melakukan penelitian kualitatif. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi antara dua orang, peneliti dan subjek yang diteliti, untuk memperoleh informasi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik penelitian.⁶⁶

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat keterstrukturannya. Pertama, wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti sehingga proses tanya jawab berlangsung secara sistematis dan konsisten. Kedua, wawancara tidak terstruktur, yang memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengikuti alur percakapan secara dinamis tanpa terikat pada pertanyaan baku. Ketiga, wawancara semi-terstruktur yang merupakan perpaduan dari keduanya panduan pertanyaan telah disusun terlebih dahulu, namun penyesuaian tetap dapat dilakukan sesuai dengan respons maupun kondisi yang berkembang di lapangan.⁶⁷

⁶⁶ Surokim. Hlm: 211

⁶⁷ Nur et al., "Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research."

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara semi-struktur, di mana peneliti memiliki panduan wawancara tetapi tetap memberikan kebebasan informan dalam menjawab pertanyaan secara luas. Total keseluruhan informan yang akan diwawancara berjumlah delapan orang yang terdiri dari informan pihak DPKA dan informan dari pemustaka.

b. Observasi

Observasi adalah proses mengamati perilaku, kegiatan, dan kejadian seseorang atau sekelompok orang yang diteliti dilanjutkan dengan mencatat hasil pengamatan agar paham apa yang sebenarnya terjadi.⁶⁸

Terdapat tiga jenis observasi: partisipasi penuh, partisipasi moderat, dan observasi kelompok. Dalam observasi partisipasi penuh, peneliti sepenuhnya menjadi anggota kelompok yang diteliti, dan identitasnya sebagai peneliti mungkin dirahasiakan. Dalam observasi partisipasi moderat, peneliti mengambil peran seimbang antara insider (berpartisipasi) dan outsider (mengamati), dan identitas peneliti diketahui. Dalam observasi kelompok, peneliti mengambil peran seimbang antara insider (berpartisipasi) dan outsider.⁶⁹

Adapun penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan moderat. Di mana peneliti ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam beberapa program perpustakaan serta juga sekaligus mengamati program perpustakaan yang dijalankan.

⁶⁸ Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. Hlm: 239

⁶⁹ Nur et al., "Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research."

c. Dokumentasi

Surokim mengutip pendapat Sugiono bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang terjadi, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Oleh karena itu, dokumen dapat digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi penelitian. Sumber data lainnya yang dapat digunakan termasuk sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya monumental lainnya yang dapat memberikan informasi bagi penelitian.⁷⁰

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa laporan program perpustakaan, foto kegiatan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Fokus	Indikator	Aspek yang Diuji
Peran DPKA dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4	Motivator	Upaya mendorong minat baca, budaya literasi, dan kesadaran belajar masyarakat
	Fasilitator	Penyediaan bahan bacaan, fasilitas belajar, pelatihan, layanan informasi dan ruang belajar
	Mediator	Literasi sejak dini, pembelajaran sepanjang

⁷⁰ Surokim, *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. Hlm: 241

		hayat, akses informasi, dan inklusivitas
Tantangan	Internal	Anggaran, SDM, sarana dan prasarana
	Eksternal	Kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi digital, dan faktor eksternal lainnya
	Implementasi SDG 4	Keberadaan acuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi yang secara eksplisit berkaitan dengan SDG 4

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah cara untuk menemukan dan merangkai secara sistematis terhadap data yang telah didapatkan melalui wawancara, dokumentas, dokumentasi, maupun hasil catatan. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap topik penelitian dan menyajikan kepada orang lain sebagai temuan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga tahapan dalam menganalisis data yang populer dengan metode

analisis data interaktif yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.⁷¹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah mekanisme dalam menyeleksi, memfokuskan, dan transformasi data dari catatan lokasi yang rumit menjadi rangkuman sistematis, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memahami fenomena yang diteliti.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan peran dan tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs dan mengesampingkan data yang tidak sesuai atau berada di luar konteks yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif mencakup penggunaan teks naratif yang mendalam, pengelompokan data sesuai kategori dan tema, pembuatan matriks atau bagan konseptual, dan pembuatan model atau kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara temuan penelitian. Proses membantu peneliti untuk menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti.⁷³

⁷¹ Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hlm: 121

⁷² Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

⁷³ Qomaruddin and Sa'diyah.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikategorikan sesuai indikator penelitian.

c. Kesimpulan

Saat memulai proses pengumpulan data, disitulah peneliti harus membaca makna dari data yang diperoleh untuk membantu proses pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan tidak boleh berdasarkan keinginan atau kuasa peneliti, harus sesuai berdasarkan hasil data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.⁷⁴

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan, sehingga dapat menjelaskan peran dan tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDGs.

G. Kredibilitas Data

Menurut versi penelitian kualitatif, keabsahan data memiliki makna yang sama dari konsep validitas (kuat, benar) dan reliabilitas (keandalan) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.⁷⁵ Adapun teknik yang peneliti lakukan untuk menguji kredibilitasnya adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Qomaruddin and Sa'diyah.

⁷⁵ Husnailail. M et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): hlm. 70.

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengecekan data dengan menggunakan sesuatu yang lain guna kebutuhan perbandingan terhadap data tersebut.⁷⁶ Triangulasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁷⁷

Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan cara: *pertama*, triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban dari berbagai informan, baik dari kepala bidang, pustakawan, maupun pemustaka. *Kedua*, menggunakan cara triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar memperoleh informasi lebih akurat.

b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan merupakan penambahan masa penelitian dalam rangka untuk pengumpulan data atau melakukan pengecekan data. Teknik ini dapat menjadikan hubungan peneliti dengan informan semakin akrab, sehingga akan semakin terbuka karena menumbuhkan kepercayaan informan kepada peneliti.⁷⁸

⁷⁶ Husnallail. M et al., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): hlm. 70.

⁷⁷ Nur et al., “Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data *Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research.*”

⁷⁸ Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hlm: 130

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) adalah satuan kerja perangkat daerah di bawah Pemerintah Provinsi Aceh yang bertugas mengelola perpustakaan dan kearsipan. DPKA dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja DPKA. Kantornya berlokasi di Jalan Teuku Nyak Arief No. 5, Kelurahan Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.⁷⁹

DPKA yang berkantor pusat di Banda Aceh, memiliki tanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas ini pertama kali didirikan pada tahun 1969 dengan sebutan Perpustakaan Negara di Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. Awalnya perpustakaan ini hanya berupa ruangan seluas 12 meter persegi dengan koleksi sebanyak delapan puluh eksemplar dan memiliki dua orang staf.⁸⁰

Instansi ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama dan status. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

⁷⁹ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, “Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh,” 2026 <https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9> Diakses pada tanggal 29 April 2026..

⁸⁰ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, “Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh,” 2026 <https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9> Diakses pada tanggal 29 April 2026.

8429/C/B.3/1979, berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Kemudian kembali mengalami perubahan mengikuti Keppres Nomor 11 Tahun 1985 menjadi Perpustakaan Daerah, dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengikuti Keppres Nomor 50 Tahun 1997.

Perubahan belum berakhir, Ketika Perda Nomor 39 Tahun 2001 ditetapkan, maka Lembaga ini berganti nama menjadi Badan Perpustakaan Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, Badan Perpustakaan Provinsi Aceh digabungkan dengan Badan Arsip Provinsi Aceh menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh.⁸¹

Hingga pada tahun 2017, sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, instansi ini resmi merubah tata nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA), sebagaimana yang masih berlaku hingga sekarang.⁸² Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, DPKA memiliki visi sebagai berikut:

⁸¹ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, “Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh,” 2026 <https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9> Diakses pada tanggal 29 April 2026.

⁸² Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, “Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh,” 2026 <https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9> Diakses pada tanggal 29 April 2026.

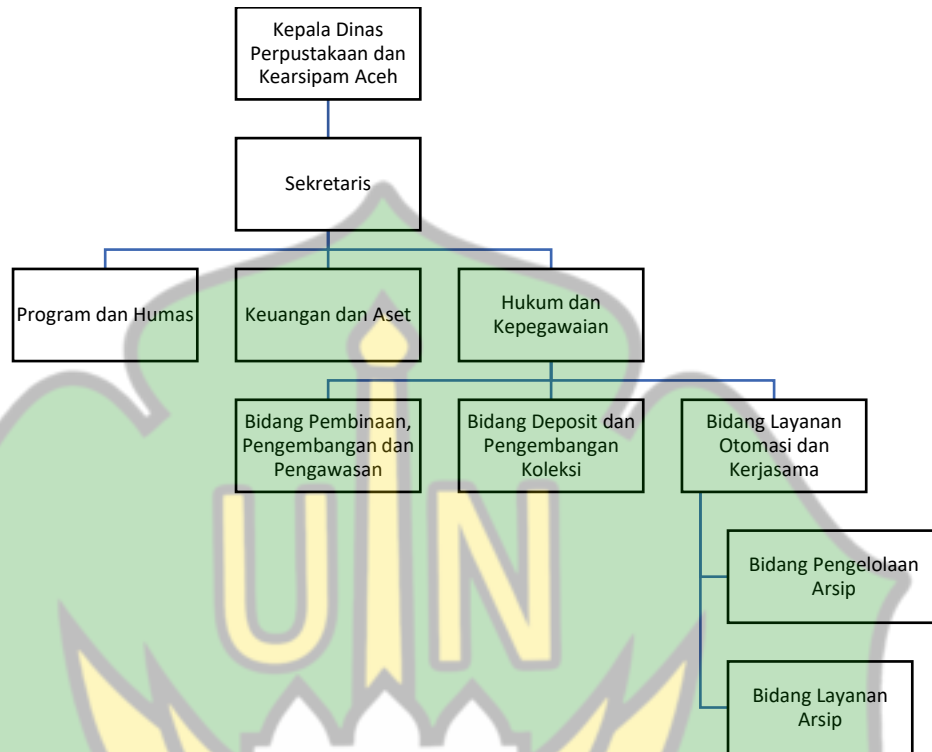
2. Visi Dan Misi

“Terwujudnya Aceh yang damai melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” Adapun misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah aceh.
2. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan. Menggali, Menyelamatkan,
3. Melestarikan dan memanfaatkan 50embangu budaya aceh dan nilai-nilai dinul islam.
4. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme 50embangun kearsipan dan perpustakaan.
5. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca.
6. Masyarakat meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan 50embangunan SDM.
7. Membina kerja sama kearsipan dan perpustakaan di dalam dan luar negeri.⁸³

⁸³ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, “Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh,” 2026 <https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9> Diakses pada tanggal 29 April 2026.

3. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh



Dalam konteks penelitian ini, informan yang diwawancarai berasal dari beberapa posisi pada struktur di atas, yaitu Sub-Koordinator Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, Koordinator Seksi Pengembangan Perpustakaan, , serta tenaga pustakawan fungsional. Tujuan pemilihan informan dari berbagai lapisan hierarki adalah untuk memperoleh 51embangu yang menyeluruh tentang penerapan program perpustakaan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan layanan di lapangan.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

- a. Dimensi 1: Literasi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan umum tidak pernah membedakan status penggunaannya. Perpustakaan dituntut aktif dalam mengoptimalkan penyediaan informasi. Itu artinya, perpustakaan perlu menciptakan motivasi dan inovasi untuk masyarakat agar berminat mengunjungi dan merasa betah menggunakan layanan perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melaksanakan kegiatan literasi menasar berbagai kelompok masyarakat dengan usia dan latar belakang yang berbeda. Program literasi yang dilaksanakan oleh DPKA disesuaikan berdasarkan umur.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator layanan Layanan, sebagai berikut:

“Program literasi kita sesuaikan berdasarkan umur, kalau untuk anak-anak biasanya ada storytelling, untuk remaja kampanye membaca, untuk dewasa ada juga BIMTEK Literasi.”⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

Dari hasil wawancara, berikut pemetaan program literasi yang dilaksanakan dan dipetakan berdasarkan usia yang dimuat dalam tabel.

Tabel 4.1 Pemetaan Program Literasi yang dilakukan oleh DPKA

Program	Target	Frekuensi	Deskripsi
<i>Storytelling</i>	Anak-anak (TK-SD)	Bulanan	Membacakan cerita dengan interaktif
Bedah Buku	Mahasiswa, Masyarakat Umum	3-6 kali pertahun	Mendiskusikan konten buku, kelebihan dan kekurangan buku
Kampanye Membaca	SMP-SMA	Teratur	Meningkatkan kesadaran remaja untuk membaca
Lomba Bercerita	SD	1 kali pertahun	Mengadakan lomba mendongeng
BIMTEK Literasi	Masyarakat Umum	Berkala	Bimbingan teknologi literasi, khususnya petugas perpustakaan desa
Teater Perpustakaan	Masyarakat Umum	Berkala	Pemutaran video edukatif

Sumber: Hasil Olahan wawancara

Berdasarkan program literasi yang telah dipetakan, DPKA melaksanakan kegiatan literasi menyasar berbagai kelompok masyarakat dengan usia dan latar

belakang yang berbeda. Apabila dihubungkan dengan SDG 4, maka *storytelling* dapat mendukung pengembangan literasi dini pada anak-anak. Kampanye membaca dan bedah buku adalah upaya DPKA untuk menyokong budaya membaca, berpikir kritis, dan meningkatkan pengetahuan. BIMTEK adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat sehingga mendukung proses pembelajaran, Serta *library teater* adalah sarana pembelajaran alternatif untuk masyarakat umum. Ini menandakan DPKA memiliki inisiatif untuk menjangkau lapisan masyarakat yang berbeda, selaras dengan pembelajaran sepanjang hayat.

Penerapan pembelajaran sepanjang hayat di DPKA dapat dilihat dari inisiatif konkret. *Pertama*, konsep Mall Baca. Pemberian nama Mall Baca merupakan upaya DPKA dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi dan kegiatan masyarakat. Bukan hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi media bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, program Inklusi Sosial. Program yang diberikan untuk melatih keterampilan *skill* kepada rumah tangga dan masyarakat umum. Bentuk program yang pernah dilaksanakan oleh pihak DPKA di antaranya adalah pelatihan memasak gingseng, pelatihan membuah mie homemade, pelatihan fotografi, dan *workshop* konten kreator. *Ketiga*, ruang Baca Mandiri. DPKA menyediakan bahan bacaan yang tidak hanya sebatas buku formal saja, melalui bahan bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan.

Hal ini dijelaskan oleh Kordinator Tim Layanan:

“Penamaan Mall Baca itu karena kita mau perpustakaan menjadi pusat kegiatan masyarakat, bisa belajar di sini, tidak hanya sebatas buku bacaan SD, SMP,

SMA saja yang formal. Makanya kita adakan ruang baca, ada ruang untuk anak, remaja, sampai umum. Supaya semua bisa dapat”⁸⁵

Hal ini dikonfirmasi olehinforman pemustaka:

“Pernah ikut acara membuat mie homemade, yang buatnya langsung dari tepung sampai jadi. Karena kegiatan itu saya dapat ilmu baru tentang pembuatan mie yang sehat. Itu ‘kan ilmu yang berguna buat kehidupan sehari-hari, siapapun bisa ikut dan perpustakaan ini memfasilitasi ilmu tersebut.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, DPKA menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dengan melaksanakan program-program yang juga dikategorikan berdasarkan usia. Hal ini dilakukan agar setiap usia mendapatkan program yang relevan. Berikut adalah tabel pemetaan program berdasarkan usia hasil olahan dari wawancara yang dilakukan:

Tabel 4.3. Segmentasi Program Inklusi Sosial DPKA

Target	Program
Anak-anak	Lomba Mewarnai, Program Membaca Nyaring, <i>Storytelling</i>
Remaja	Kampanye Membaca, Pelatihan Fotografi, <i>Workshop</i> konten Digital, Bedah buku.

⁸⁵ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

⁸⁶ Wawancara dengan Hilya Suri Safra, Mahasiswa Angkatan 2022, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Pada tanggal 03-06-2026

Dewasa	Pelatihan keterampilan hidup (memasak, membuat kerajinan), pelatihan literasi digital.
Semua Usia	Bahan bacaan beragam, penyediaan fasilitas umum seperti ruang diskusi, <i>teater library</i> , <i>I-pustaka Aceh</i> .

Sumber: Hasil Olah Data Wawancara

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, berbagai program yang tersegmentasi berdasarkan usia menunjukkan perubahan fungsi yang dilakukan adalah wujud DPKA telah menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan kesempatan belajar yang terbuka, fleksibel, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, DPKA berperan sebagai tempat pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas masyarakat secara berkelanjutan.

b. Dimensi 2: Akses Informasi

Akses informasi dan penelitian bagi akademis. Menurut Eskha, sebagai pusat media dan sarana akademisi, perpustakaan memberikan berbagai macam koleksi pustaka. Oleh karena itu, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan berbagai informasi sesuai bidang keilmuan untuk tujuan akademisi maupun untuk menemukan bacaan yang bersifat menghibur.

DPKA memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pemustaka kepada akses informasi yang berkualitas lewat pengembangan koleksi yang terstruktur. Berdasarkan wawancara bersama pustakawan mengatakan:

“Untuk meningkatkan sumber koleksi, kita terlebih dahulu membentuk tim seleksi yang anggotanya terdiri dari berbagai macam kalangan. Kita pustakawan, ada juga juga kita libatkan MPU, Polresta, Kejaksaan Tinggi Aceh, unsur guru, perwakilan perguruan tinggi, yang memahami kebutuhan informasi masyarakat.”⁸⁷

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pemustaka kepada akses informasi yang berkualitas lewat pengembangan koleksi yang terstruktur. DPKA tidak melaksanakannya hanya dengan satu pihak saja, tetapi hasil dari sinergi antara perpustakaan dengan instansi lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Polresta, Kejaksaan Tinggi Aceh, guru, dan perwakilan perguruan tinggi yang. Metode ini menunjukkan adanya kolaboratif sehingga koleksi yang tersedia beragam dan dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat dari berbagai bidang.

Kegiatan seleksi yang dilakukan DPKA memperlihatkan pendekatan yang terukur dan partisipatif. Ini ditandai dengan pembentukan tim seleksi resmi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang berbeda-beda. Pengadaan buku juga didasarkan dengan pertimbangan keadaan lokal dan budaya. Lebih lanjut, dalam berupaya menyediakan informasi relevan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat,

⁸⁷ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf, M.Pd, Koordinator Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 22-5-2026

DPKA turut memperhatikan aspek geografis lingkungan tempat DPKA berada. Selain itu, ketersediaan kotak saran juga merupakan bagian penting dalam menentukan koleksi yang akan diadakan oleh pihak DPKA.

Lebih lanjut, dalam berupaya menyediakan informasi relevan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, informan mengatakan:

“Kalau kita di provinsi ini, kita lihat dulu lingkungannya. Lingkungan di Banda Aceh ini mahasiswa banyak. Karena kita dekat pesisir laut, tentu buku-buku juga harus ada tentang perikanan. Kita juga melihat dari kotak saran setahun sekali dan lihat buku-buku yang sering dipinjam pengunjung.”⁸⁸

Kegiatan seleksi yang dilakukan DPKA memperlihatkan pendekatan yang terukur dan partisipatif. Ini ditandai dengan pembentukan tim seleksi resmi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang berbeda-beda. Pengadaan buku juga didasarkan dengan pertimbangan keadaan lokal dan budaya. Berikut tabel alokasi koleksi DPKA.

Tabel Alokasi Koleksi DPKA

Kategori Koleksi	Proporsi	Fokus
Umum	80%	Disiplin ilmu untuk semua kalangan
Buku Bernuansa Daerah	20%	Sejarah dan budaya Aceh

⁸⁸ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf, M.Pd, Koordinator Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 22-5-2026

Sumber : Hasil olahan Wawancara

Selain memberikan koleksi yang beragam, DPKA juga memberikan akses informasi dalam bentuk pelayanan. Dengan menyediakan akses ke semua kalangan yaitu dengan beberapa pogram diantaranya perpustakaan keliling, E-Pustaka Aceh, serta penempatan POCADI (Pojok Baca Digital) di beberapa instansi.

Sub Koordinator Layanan mengatakan:

“Kita menyediakan pojok baca juga. Seperti misalnya di tempat-tempat pelayan publik. Seperti di samsat, rumah sakit, polresta. Jadi mereka saat menunggu juga bisa membaca.”⁸⁹

DPKA juga memperluas akses informasi kepada masyarakat yang berada jauh dari jangkauan perpustakaan dengan memperluas akses pelayanan perpustakaan. *Pertama*, layanan perpustakaan keliling. Berdasarkan data yang diberikan, DPKA memiliki enam armada dengan jumlah petugas perpustakaan keliling sebanyak dua belas orang. Total kunjungan perpustakaan keliling tahun 2025 adalah sebanyak 15.053. *Kedua*, Perpustakaan Digital (E-Pustaka Aceh). Untuk menjawab perkembangan teknologi dan memastikan pemustaka dapat mengakses koleksi dari mana saja tanpa harus ke 59emban fisik, DPKA menyediakan *platform* digital yaitu I-Pustaka Aceh yang dapat diunduh melalui *play store*. Total judul buku digital sebanyak 18.049 dengan jumlah keseluruhan 154.297 eksemplar. Adapun kunjungan E-Pustaka tahun 2025 sebanyak 65.966 akses. *Ketiga*, Pojok Baca. DPKA POCADI (Pojok Baca

⁸⁹ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

dan Pojok Baca Digital) telah tersebar di fasilitas layanan 60emban, seperti samsat, rumah sakit, dan polresta. POCADI ini disebar di berbagai tempat 60emban dengan tujuan untuk memastikan masyarakat bisa membaca di mana saja dan menghadirkan koleksi tanpa harus pemustaka langsung yang hadir ke perpustakaan.

Inovasi-inovasi di atas memperlihatkan bahwa DPKA memiliki pemahaman dalam memberikan akses informasi yang mudah bagi setiap kalangan masyarakat tanpa menunggu masyarakat yang datang ke perpustakaan, tetapi juga menjangkau masyarakat jauh dengan menghadirkan perpustakaan keliling dan POCADI serta menghadirkan pelayanan digital untuk memastikan akses informasi dapat dilakukan di mana saja.

c. Dimensi 3: Inklusi Sosial dan Aksesibilitas

Ruang inklusif di mana biaya bukan penghambat bagi pengetahuan dan keterampilan baru. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang menyediakan layanan dengan menerapkan pendekatan sosial dan bertanggung jawab untuk mampu mendukung kebutuhan informasi masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa membedakan latar belakang masyarakat tersebut. Perpustakaan dapat menjadi alternatif tempat belajar bagi anak putus sekolah, dan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, DPKA memiliki beberapa program terkait inklusi sosial dan aksesibilitas, diantaranya adalah Prgram Transformasi Pepustakaan Berbasis Inklusi

Sosial (TPBIS), penyediaan fasilitas bagi disabilitas, penerapan layanan gratis dan setara, serta penyediaan ruang bagi UMKM. Berikut penjelasannya:

1. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Program TPBIS merupakan program yang dihasilkan dari kebijakan Perpustakaan Nasional yang dilaksanakan di perpustakaan tingkat provinsi. Program ini kemudian diaplikasikan ke perpustakaan desa melalui perantara DPKA. Artinya DPKA menjembatani pelaksanaan TPBIS ke perpustakaan-perpustakaan desa. Salah satu cara pelaksanaan adalah dengan mengadakan BIMTEK Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) yang diikuti oleh pengelola perpustakaan desa. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan perpustakaan sebagai pusat belajar dan kegiatan berbasis inklusi sosial.

Hasil wawancara bersama Sub-Koordinator Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, Yasmin mengatakan:

“Ada 595 perpustakaan tersebar di 23 kabupaten/kota Aceh yang melaksanakan program TPBIS. DPKA mengadakan BIMTEK yang ditujukan kepada pengelola perpustakaan desa tentang strategi pengembangan perpustakaan. Jadi mereka ngga hanya belajar mengelola buku tapi juga cara beradvokasi dan bersinergi dengan pihak lain.”⁹⁰

Melalui program ini, DPKA tidak hanya berfokus pada instansi pusat saja, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada perpustakaan-perpustakaan tingkat desa

⁹⁰ Wawancara dengan Yasmin Yendri, S.IP, Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, Pada tanggal 19-05-2026

mengenai strategi membangun sebuah perpustakaan, baik dengan pengelolaan buku maupun tata cara beradvokasi dan bersinergi dengan pihak lain. Pendekatan yang DPKA lakukan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, meningkatkan literasi digital desa, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan dokumentasi yang diberikan oleh pihak DPKA, berikut tabel perpustakaan desa yang telah melakukan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh.

Tabel. Jumlah Perpustakaan Desa yang Melaksanakan Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2019-2025

NO.	Kabupaten/Kota	TAHUN							JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Aceh Besar	7					42	15	64
2	Nagan Raya	8	4	1			18		31
3	Bener Meriah	7		1		18	17		43
4	Aceh Tengah	9	6	3	10	9	20		57
5	Bireun			5	3		5		13
6	Aceh Barat			9			8		17
7	Aceh Timur			7			8		15
8	Gayo Lues			9			5		14
9	Aceh Utara				4	1	15		20
10	Lhokseumawe				3	4	4		11
11	Aceh Barat Daya				4	4	13		21

12	Subulussalam				6		14		20
13	Pidie				4		24		28
14	Pidie Jaya				2	2	10		14
15	Langsa				5	2	25		32
16	Aceh Tamiang						50		50
17	Aceh Jaya						14		14
18	Aceh Selatan						19		19
19	Singkil						16		16
20	Aceh Tenggara						26		26
21	Simelue						10		10
22	Banda Aceh						24	35	59
23	Sabang						1		1
	Jumlah	31	10	35	41	40	388	50	595

Sumber: Data dari DPKA

Berdasarkan tabel di atas, terjadi perkembangan pelaksanaan pada program TPBIS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah perpustakaan yang mengimplementasikan TPBIS sebanyak 31 perpustakaan. Terjadi penurunan di tahun 2020, di mana perpustakaan yang mengimplementasikannya hanya 10, kemudian di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 35, tahun 2022 sebanyak 41, dan 40 perpustakaan pada tahun 2023.

Kemudian pada tahun 2024, terjadi fenomena unik di mana peningkatan paling signifikan yaitu sebanyak 388 perpustakaan yang menerapkan TPBIS. Selanjutnya pada tahun 2025 sebanyak 50 perpustakaan bertambah pada program TPBIS ini

sehingga total akumulasi seluruh perpustakaan yang menerapkan TPBIS dari tahun 2019 sampai 2025 mencapai 595 perpustakaan desa.

Fenomena unik lonjakan partisipan perpustakaan di tahun 2024 menjadi penanda bahwa adanya percepatan penerapan program TPBIS perpustakaan di Aceh. Ini terjadi karena DPKA secara aktif melakukan pembinaan melalui BIMTEK kepada perpustakaan desa. Berikut ini dokuemnatsi pelaksanaan BIMTEK inklusi sosial yang dilakukan pada tahun 2024 sampai 2025.

Tabel Kegiatan TPBIS tahun 2024-2025

Tahun Pelaksanaa	Nama Kegiatan	Target Peserta	Jumlah Peserts	Lokasi Pelaksanaan
2024	Sosialisasi Regulasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024	Perwakilan Desa	50	Aceh Tamiang
	Bimbingan Teknis SPP dan TIK Program Transformasi	Pengelola perpustakaan Desa	50	Aceh Tamiang

	Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024			
2025	Workshop Regulasi Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2025	Kepala Desa (Keuchik)/Aparatur Desa dan Pengelola Perpustakaan)	50	Banda Aceh
	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2025	Perangkat pengelola perpustakaan desa	63	Banda Aceh

Sumber: Data dari DPKA

Kegiatan TPBIS yang dilakukan oleh DPKA melalui sosialisasi dan bimbingan merupakan satu komitmen DPKA untuk meratakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di berbagai perpustakaan yang tersebar di seluruh Aceh. Hal ini untuk memastikan perpustakaan desa bisa menjadi sarana bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang inklusif, DPKA menyediakan ruangan khusus untuk disabilitas. Di dalam ruangan itu, tersedia koleksi dan fasilitas yang mendukung kebutuhan pemustaka disabilitas. Ibu Lisa Siska Dewi menjelaskan:

“DPKA memiliki ruangan khusus bagi penyandang disabilitas. Di situ ada buku braille, ada koleksi audio visual. Hanya saja untuk komputernya kita belum ada. Tapi kalau yang lain seperti alat bantu dengar, tongkat, dan kursi roda, kita sudah ada.”⁹¹

DPKA menyediakan buku *braille* dan koleksi audio visual. Hanya saja, diperlukan beberapa sarana pendukung yang perlu dilengkapi seperti komputer untuk kemudahan pemustaka mengakses audio secara mandiri. Selain itu, DPKA juga menyediakan perangkat alat bantu bagi pemustaka disabilitas seperti tongkat bantu tunanetra, alat bantu pendengaran, dan kursi roda guna mempermudah pemustaka di lingkungan perpustakaan. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut adalah dedikasi DPKA dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan wawancara, DPKA ikut menjadi pendukung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM di dalam berbagai kegiatan perpustakaan. Hal ini disampaikan oleh informan sub coordinator Tim Layanan:

“Jika ada acara tertentu di perpustakaan, kita akan kasih akses terbuka ke umkm untuk membuka lapak selagi acara tersebut diadakan. Bisa promosi juga kan jadinya.”⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

⁹² Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

DPKA akan memberikan undangan kepada pelaku UMKM agar bisa membuka lapak dan memasarkan produknya di lingkungan perpustakaan. Ini adalah bentuk dukungan DPKA dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memberi kesempatan pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya. Keterbukaan DPKA terhadap pelaku UMKM menunjukkan akses DPKA menerapkan aksesibilitas bagi setiap kalangan, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM yang mendapatkan akses untuk mempromosikan dagangannya melalui kegiatan yang dilakukan DPKA. Hal ini menunjukkan jika perpustakaan juga sebagai ruang kolaborasi yang mendorong pengembangan kemajuan ekonomi masyarakat

DPKA juga menerapkan prinsip non-diskriminasi antar gender, di mana pelayanan diberikan untuk pemustaka tanpa membedakan perempuan atau pun laki-laki. Ibu Lisa menjelaskan:

"Untuk program inklusi sosial, siapapun boleh ikut, baik dari masyarakat umum kalangan mahasiswa, baik perempuan ataupun laki-laki, semua kami fasilitasi dengan sama."

Berdasarkan hasil wawancara, DPKA sudah menerapkan prinsip non-diskriminasi, di mana instansi ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan dan mengikuti kegiatan perpustakaan. Pernyataan dari informan Koordinator layanan Layanan menegaskan hal ini yang mengatakan jika program inklusi sosial ialah program yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, masyarakat umum, serta bagi perempuan dan laki-laki secara berkeadilan.

Informan pemustaka mengkonfirmasi aksesibilitas:

*"Untuk masuk ke perpustakaan sangat mudah. Cuma mengisi data saja, gratis. Kemudian kalau seandainya punya disabilitas, ada jalurnya. Mereka ada lift juga. Jadi sangat mudah, siapa saja bisa masuk ke perpustakaan. Memang mudah."*⁹³

Menurut penjelasan Haqqi, untuk ke perpustakaan melalui prosedur yang sangat mudah dengan pengisian data dan tidak dipungut biaya. Perpustakaan juga menyediakan jalur khusus disabilitas dan lift, yang memudahkan mobilitas pemustaka disabilitas. Dengan demikian, perpustakaan memiliki peran sebagai ruang publik yang inklusif dan emenunjang pembelajaran sepanjang hayat bagi semua kelompok masyarakat.

Penerapan kesetaraan gender dan gratis untuk semua kalangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerapkan prinsip non-diskriminasi antar gender, di mana pelayanan yang diberikan pihak DPKA untuk pemustaka berlaku untuk semua gender, tanpa membedakan perempuan atau pun laki-laki. Instansi ini menerapkan kesetaraan kepada seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan pelayanan dan mengikuti kegiatan perpustakaan. Seluruh program yang dilaksanakan oleh pihak DPKA dapat diikuti baik oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, masyarakat umum, serta bagi perempuan dan laki-laki secara berkeadilan dan tanpa biaya. Dalam penerapan sanksi keterlambatan koleksi pun, DPKA menerapkan prinsip *skors*, yaitu di mana pemustaka dilarang meminjam koleksi sesuai

⁹³ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Pemustaka, Program Studi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pada tanggal 20-5-2026

dengan jumlah hari keterlambatan pengembalian koleksi. Ini menunjukkan, seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pihak DPKA setara dan tanpa dipungut biaya,

2. Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4

Salah satu tantangan utama yang DPKA hadapi dalam mendukung perwujudan SDG 4 adalah terbatasnya anggaran. Anggaran dapat mempengaruhi berbagai bidang perpustakaan, mulai dari pengembangan koleksi hingga pelaksanaan program kegiatan dan pemberdayaan masyarakat di perpustakaan.

Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan menjelaskan:

“Anggaran itu berpengaruh sama pengadaan buku. Setiap tahun kami melakukan pengadaan tetapi walaupun ada, perkembangan pengetahuan semakin maju, dan itu tergantung juga dengan anggaran kita”⁹⁴

Dari wawancara tersebut, DPKA melakukan pengembangan koleksi setiap tahun tetapi jumlah dan jenis koleksi yang diperlukan bergantung pada tersedianya anggaran. Di sisi lain, ilmu pengetahuan yang berkembang dan kebutuhan informasi yang meningkat menyebabkan perpustakaan menghadapi tantangan dalam menyediakan koleksi yang selalu mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan layanan digital seperti koleksi digital di E-Pustaka Aceh merupakan salah satu jalan alternatif dalam memperluas akses informasi tanpa harus mengadakan koleksi fisik. Tetapi, pengembangan koleksi digital tetap membutuhkan

⁹⁴ Wawancara dengan Yasmin Yendri, S.IP, Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, Pada tanggal 19-05-2026

anggaran yang besar sehingga tidak sepenuhnya cukup untuk memberi jawaban terhadap permasalahan anggaran ini.

Selain berpengaruh terhadap koleksi, keterbatasan anggaran juga berdampak pada keberlangsungan program-program literasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan keterangan narasumber, frekuensi pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada alokasi dana yang tersedia setiap tahun. Program inklusi sosial yang sebelumnya dapat dilaksanakan beberapa kali dalam setahun bahkan tidak dapat diselenggarakan pada periode tertentu karena adanya efisiensi anggaran.

Anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di perpustakaan. Sub Koordinator Layanan Perpustakaan mengatakan:

“Anggaran itu menentukan juga kegiatan yang dilakukan. Untuk tahun ini, kegiatan inklusi sosial seperti keterampilan memasak kita efisiensi, jadi tidak ada. Biasanya kegiatan tersebut bisa sampai enam kali dalam setahun, tetapi ada yang tiga kali. Semua tergantung anggaran yang ada.”⁹⁵

Informan Pustakawan mengidentifikasi masalah kompetensi pustakawan.

“Jika kita lihat profesionalisme mungkin terbatas ya. Standar mungkin 30 sampai 40 persen tapi kalau 60 sampai 70 persen kita belum. Ada yang professional, tapi belum sepenuhnya.”⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

⁹⁶ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf, M.Pd, Koordinator Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 22-5-2026

Informan menjelaskan jika kompetensi digital pustakawan masih belum merata. Beberapa pustakawan telah mempunyai kemampuan yang bagus dalam pelayanan teknologi, jumlahnya terbatas. Narasumber memperkirakan sekitar 30 sampai 40 persen sumber daya manusia yang dapat mengelola berbagai layanan digital secara maksimal.

Fenomena tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk perpustakaan mengingat saat ini bertransformasi menuju layanan berbasis teknologi seperti katalog *online*, perpustakaan digital E-Pustaka, serta layanan berbasis internet lainnya yang memerlukan pustakawan terampil di bidang teknologi informasi. Apabila kompetensi sumber daya manusia tidak berkembang sejalan dengan transformasi digital maka pemanfaatan layanan masih belum maksimal.

Selain kompetensi untuk pelayanan digital, Informan Pustakawan juga mengidentifikasi sisi profesionalisme dan pengembangan SDM. Menurutnya, meski pustakawan yang sudah memiliki kompetensi profesional yang baik, tetap perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan layanan perpustakaan *modern*.

“Semenjak covid-19, banyak kegiatan pelatihan dan pengembangan SDP perpustakaan dilakukan melalui zoom. Menurut saya, pelatihan daring kurang efektif dibanding tatap muka karena tidak fokus dan materi kurang diserap dengan baik.”⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf, M.Pd, Koordinator Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 22-5-2026

Peningkatan kompetensi dilakukan dengan bermacam pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, sejak pandemi covid-19, pelatihan dilaksanakan melalui *platform* Zoom. Menurut Informan pustakawan, pelatihan yang dilakukan secara daring menyebabkan rendahnya konsentrasi dan partisipasi peserta dibandingkan pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka. Dampaknya penyerapan pengetahuan dan keterampilan belum optimal.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pemustaka, secara keseluruhan fasilitas yang disediakan oleh pihak DPKA sudah baik dan mampu menunjang kegiatan pembelajaran. Namun demikian, diperlukan peningkatan beberapa fasilitas yang untuk memberikan kenyamanan yang lebih maksimal. Informan mengatakan:

“Karena perpustakaan sering ramai, jadi outdoor kurang, kalau makan harus nunggu orang. Lift kan ada dua, satunya lumayan sering diperbaiki, jadi disitu juga harus antri lama. Terus parkir juga sering penuh.”⁹⁸

Salah satu fasilitas yang disoroti oleh pemustaka adalah keterbatasan tempat duduk di *outdoor*. Informan menilai jika tempat duduk yang tersedia belum dapat mengakomodasi jumlah pemustaka yang ingin beristirahat atau makan di sana. Ketika jumlah pengunjung meningkat, ketersediaan tempat belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan pengguna.

⁹⁸ Wawancara dengan Lia Fitri, Mahasiswa, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Pada tanggal 23-5-2026

Selain itu, ketersediaan dua *lift* untuk pengunjung juga dinilai oleh pemustaka sangat membantu dalam aksesibilitas di perpustakaan. Tetapi, sewaktu-waktu, kondisi salah satu *lift* yang mengalami gangguan bersamaan dengan tingginya tingkat kunjungan menjadikan pengunjung lama mengantre.

Penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun DPKA telah menyediakan berbagai fasilitas, peningkatan juga tetap diperlukan mengingat jumlah kunjungan pemustaka yang tinggi sehingga dapat mendukung kualitas pengalaman pemustaka dalam memanfaatkan pengalaman.

Informan Koordinator layanan Layanan mengatakan keterbatasan fasilitas disabilitas.

*“DPKA memiliki ruangan khusus bagi penyandang disabilitas. Di situ ada buku braille, ada koleksi audio visual. Hanya saja untuk komputernya kita belum ada. Tapi kalau yang lain seperti alat bantu dengar, tongkat, dan kursi roda, kita sudah ada.”*⁹⁹

DPKA menyadari kebutuhan informasi adalah hak berbagai kalangan sehingga mereka menyediakan fasilitas informasi kepada pemustaka disabilitas. Tetapi, terdapat fasilitas seperti komputer yang masih diperlukan tahap pengembangan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pemustaka disabilitas dalam mengakses informasi secara mandiri.

⁹⁹ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

Dengan demikian, tersedianya fasilitas fisik yang memadai adalah salah satu faktor yang mendukung lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman. Meski tidak secara langsung dengan informasi, tetapi fasilitas yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai sebagai tempat belajar sepanjang hayat.

Salah seorang informan menyatakan bahwa internet memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara lebih cepat melalui mesin pencari. Sementara itu, informan lain menjelaskan bahwa penggunaan internet lebih praktis karena tidak terikat oleh jarak tempuh dan jam layanan perpustakaan.

Ini memperlihatkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk perpustakaan dalam mempertahankan perpustakaan yang relevan di tengah peningkatan arus informasi.

Meskipun demikian, perpustakaan tetap memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam menyediakan sumber informasi yang telah melalui proses seleksi dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital seperti E-Pustaka Aceh menjadi salah satu strategi yang dilakukan DPKA sebagai bentuk penyesuaian layanan perpustakaan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Sub Koordinator Layanan juga mengatakan tantangan lain yang dirasakan oleh DPKA adalah masih adanya paradigma lama masyarakat terhadap perpustakaan sehingga pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat belum optimal.

Informasi ini disampaikan dalam wawancaranya:

“Sekarang masih ada juga orang yang berpikir perpustakaan itu tidak penting. Apalagi daerah yang jauh. Dia belum tahu perpustakaan sudah begini. Kalau kita peduli, pasti kita cari tahu”¹⁰⁰

Informan menjelaskan jika paradigma tersebut biasanya masih ada pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat yang belum pernah memanfaatkan perpustakaan secara langsung. Dampak dari hal tersebut, inovasi dan program yang dikembangkan DPKA belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Kondisi ini menjadi tantangan untuk DPKA untuk meningkatkan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKA.

Salah satu upaya yang dilakukan DPKA untuk menjawab tantangan tersebut adalah mempromosikan dan mensosialisasikan lewat media sosial. Media sosial dimanfaatkan untuk memperlihatkan berbagai jenis koleksi dan layanan yang tersedia sehingga membangun persepsi perpustakaan yang modern, terbuka, dan sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

Meskipun demikian, pencapaian yang dilakukan melalui promosi melalui media sosial masih terbatas, terutama perihal masyarakat yang akses internetnya terbatas atau tidak aktif menggunakan media digital. Maka dari itu, perlu adanya strategi promosi yang bervariasi agar informasi layanan perpustakaan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Lisa Siska Dewi, Sub Koordinator Seksi Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 20-5-2026

Berdasarkan hal di atas, memperlihatkan bahwa berhasilnya program perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh layanan dan fasilitas, melainkan juga dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan perpustakaan. Dalam konteks SDG, akses pendidikan dan pembelajaran hayat tidak akan maksimal jika kesadaran masyarakat terhadap manfaat perpustakaan masih kurang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai peran perpustakaan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas.

Koordinator Pembinaan dan Pengembenagan perpustakaan mengatakan:

“Untuk merencanakan program, kita pakai SNP, Standar Nasional Perpustakaan dari Perpustnas. Tapi kita tahu ada SDG.”¹⁰¹

Kemudian pustakawan menjelaskan:

“Di perpustakaan ini, untuk sosialisasi khusus SDG itu tidak ada. Cuma kita tau perpustakaan harus ngembangin literasi, informasinya, harus jadi pusat belajar masyarakat. Kalau itu, kita sudah melakoninya, sudah menjalankan Cuma ngga tau namanya. Kadang-kadang juga diarahkan sama pimpinan.”¹⁰²

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan ternyata pemimpin perpustakaan sadar akan adanya SDG, tetapi hanya sebatas pengetahuan saja, Ketika ditanya mengenai keterkaitan program dengan SDG, narasumber mengakui bahwa konsep SDGs telah dikenal, tetapi belum menjadi acuan utama dalam penyusunan

¹⁰¹ Wawancara dengan Yasmin Yendri, S.IP, Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, Pada tanggal 19-05-2026

¹⁰² Wawancara dengan Drs. M. Yusuf, M.Pd, Koordinator Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pada tanggal 22-5-2026

maupun pengembangan program perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan SDG sebagai kerangka kerja dalam perencanaan program masih belum dilakukan secara eksplisit. Fenomena tersebut terjadi karena DPKA mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional.

Selain itu, belum ada sosialisasi secara khusus kepada pustakawan dalam memahami SDG di lingkungan perpustakaan. Namun, pustakawan tersebut memahami dan menyadari perpustakaan harus memberikan akses informasi, literasi, dan menjadi pusat belajar masyarakat umum. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan tersebut sebenarnya sudah selaras dengan pemahaman konteks SDG 4 (Pendidikan berkualitas), meskipun pelaksanaannya tidak menyadari apa yang dilakukan telah sejalan perwujudan SDG 4.

A. Pembahasan

1. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, program-program yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat dipetakan ke dalam tiga peran perpustakaan menurut Sutarno (2006), yakni fasilitator, motivator, dan mediator. Ketiga peran tersebut dioperasionalkan melalui empat indikator IFLA yaitu akses informasi, literasi dini dan pembelajaran sepanjang hayat, serta ruang inklusif yang kemudian dikaitkan dengan target-target SDG 4.

Sebagai fasilitator, DPKA menjalankan perannya melalui dua indikator IFLA sekaligus, yaitu akses informasi dan ruang inklusif. Pada indikator akses informasi,

DPKA menyediakan koleksi yang beraneka ragam mulai dari buku akademik, umum, anak-anak, sampai koleksi yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, DPKA juga memberikan layanan E-Pustaka Aceh yang pada tahun 2025 telah diakses sebanyak 65.966 kali akses. Ini membuktikan bahwa DPKA secara aktif memperluas jangkauan akses informasi ke ranah digital. Program Perpustakaan Keliling dan penempatan pojok baca di beberapa instansi juga memperkuat peran fasilitator ini dengan memberikan akses kepada masyarakat di wilayah yang jauh dari gedung perpustakaan, sehingga hambatan geografis bukan lagi menjadi penghalang untuk masyarakat ketika mengakses informasi. Keseluruhan program ini berkontribusi pada target SDG 4.1 tentang pendidikan dasar berkualitas dan target 4.5 tentang penghapusan disparitas akses pendidikan.

Pada indikator ruang inklusif, DPKA memainkan peran fasilitatornya dengan menerapkan kebijakan layanan yang gratis bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, layanan khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan buku braille, audio visual, dan alat bantu, serta program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang kini telah menjangkau 595 perpustakaan desa di seluruh Aceh. Meskipun demikian, berdasarkan pengakuan informan, fasilitas layanan disabilitas masih pada proses pengembangan sehingga statusnya dikategorikan berjalan terbatas.

Sebagai motivator, DPKA memiliki peran untuk menyokong dan meningkatkan semangat belajar masyarakat melalui dua indikator IFLA, yaitu literasi dini dan pembelajaran sepanjang hayat. Pada indikator literasi dini, berbagai program seperti *storytelling* untuk anak-anak sekolah dasar, lomba mendongeng, kampanye membaca,

dan bedah buku dirancang untuk membangun kebiasaan literasi dari usia dini. Adanya fasilitas ruang baca anak yang ramah anak di gedung DPKA ikut andil dalam menciptakan suasana yang mendukung bagi tumbuhnya minat baca pada kelompok usia termuda. Program-program ini secara langsung mendukung target SDG 4.1 tentang pendidikan dasar berkualitas dan target 4.6 tentang peningkatan literasi dan numerasi seluruh lapisan masyarakat. Pada indikator pembelajaran sepanjang hayat, DPKA menjalankan peran motivatornya melalui berbagai macam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang terstruktur, meliputi BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal, BIMTEK Literasi Informasi untuk pustakawan dan pegiat literasi, Sayembara Menulis, serta Workshop Karya Ilmiah. Program-program ini bukan hanya mendorong motivasi belajar, tetapi juga menghasilkan karya nyata dari peserta yang sejalan dengan target SDG 4.3 tentang akses pendidikan vokasional dan target 4.6 tentang peningkatan literasi masyarakat.

Sebagai mediator, DPKA menjadi jembatan untuk kebutuhan masyarakat dengan sumber daya informasi, melalui dua dari indikator IFLA, yaitu pembelajaran sepanjang hayat dan akses informasi. Pada indikator pembelajaran sepanjang hayat, peran mediator DPKA paling tampak dalam program workshop keterampilan praktis seperti memasak dan kecantikan, BIMTEK Konten Kreator, festival dan pameran UMKM yang memberdayakan pelaku usaha kecil, serta *Library Theater* sebagai sarana ekspresi komunitas seni dan budaya. Program-program ini secara efektif menjembatani kebutuhan masyarakat akan keterampilan hidup dengan sumber daya yang dapat perpustakaan sediakan, selaras dengan target SDG 4.3 tentang akses pendidikan vokasional dan target 4.4 tentang peningkatan keterampilan relevan untuk

dunia kerja. Yang menarik, temuan lapangan menunjukkan bahwa peserta *workshop* keterampilan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi sebagian di antaranya berhasil merealisasikannya dalam bentuk usaha ekonomi mandiri sebuah dampak yang melampaui batas literasi dan menyentuh dimensi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada indikator akses informasi, DPKA menjalankan peran mediatornya melalui mekanisme pengadaan koleksi melalui survei kebutuhan pemustaka dan kotak saran, sehingga koleksi yang tersedia benar-benar merespons kebutuhan informasi riil masyarakat, bukan sekadar pengadaan rutinitas administratif.

Secara keseluruhan, berbagai program yang disebutkan berjalan. Tidak ada satu pun program yang benar-benar tidak berjalan, yang berarti DPKA secara substantif telah berkontribusi pada pencapaian target SDG 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.7 melalui ketiga peran perpustakaan menurut Sutarnoo. Namun demikian, terdapat satu catatan kritis yang menjadi temuan paling signifikan dalam penelitian ini: tidak ada dokumen resmi DPKA yang secara eksplisit menjadikan SDG 4 sebagai acuan perencanaan program. Seluruh perencanaan program mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dari Perpustakaan Nasional, bukan pada target SDG 4 secara langsung. Kondisi ini sebagaimana dikonfirmasi oleh informan yang menyatakan bahwa mereka telah menjalankan program-program yang selaras dengan SDG 4, namun tidak mengetahui bahwa itulah namanya. Temuan ini menunjukkan bahwa bahwa sinergi program DPKA dengan SDG 4 berlangsung melalui rantai SNP dilanjutkan IFLA hingga SDG 4, tetapi belum ada formal karena kontribusi tersebut tidak tercatat dan tidak terencana secara formal sebagai bagian dari upaya pencapaian SDG 4.

Data kunjungan pemustaka memiliki peran yang penting dalam keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh DPKA. Data kunjungan ini sebagai bukti penting ketika menyusun laporan evaluasi dan dokumentasi program DPKA. Temuan ini kembali menunjukkan bahwa pemahaman tentang nilai keberlanjutan program oleh pihak DPKA merupakan bagian dari SDG.

2. Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Mensinergikan program perpustakaan dengan SDG 4

Dalam menjalankan program perpustakaan, DPKA menghadapi berbagai tantangan. DPKA mengalami banyak tantangan baik dari segi internal maupun eksternal. *Pertama*, Tantangan Internal. Dalam segi internal, DPKA mengalami tantangan berupa anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas. *Anggaran*, Salah satu tantangan utama yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hadapi dalam mendukung perwujudan SDG 4 adalah terbatasnya anggaran. Anggaran dapat mempengaruhi berbagai bidang perpustakaan, mulai dari pengembangan koleksi hingga pelaksanaan program kegiatan dan pemberdayaan masyarakat di perpustakaan. Yasmin menjelaskan:

DPKA melakukan pengembangan koleksi setiap tahun tetapi jumlah dan jenis koleksi yang diperlukan bergantung pada tersedianya anggaran. Di sisi lain, ilmu pengetahuan yang berkembang dan kebutuhan informasi yang meningkat menyebabkan perpustakaan menghadapi tantangan dalam menyediakan koleksi yang selalu mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan layanan digital seperti koleksi digital di E-Pustaka Aceh merupakan salah satu jalan alternatif dalam memperluas akses informasi tanpa harus mengadakan koleksi fisik. Tetapi, pengembangan koleksi digital tetap membutuhkan anggaran yang besar sehingga tidak sepenuhnya cukup untuk memberi jawaban terhadap permasalahan anggaran ini.

Selain berpengaruh terhadap koleksi, keterbatasan anggaran juga berdampak pada keberlangsungan program-program literasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan keterangan narasumber, frekuensi pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada alokasi dana yang tersedia setiap tahun. Program inklusi sosial yang sebelumnya dapat dilaksanakan beberapa kali dalam setahun bahkan tidak dapat diselenggarakan pada periode tertentu karena adanya efisiensi anggaran.

Anggaran juga mempengaruhi keberlanjutan kegiatan di perpustakaan. Program perpustakaan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran. Jika dilihat, program yang dilaksanakan DPKA dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat dalam melatih keterampilan serta membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Maka dari itu, anggaran yang terbatas tidak hanya mempengaruhi pengadaan koleksi dan kegiatan, tetapi juga berpotensi untuk menghambat jangkauan manfaat program perpustakaan bagi masyarakat. Dengan demikian, pendanaan menjadi unsur penting dalam memaksimalkan peran perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan pendukung pencapaian SDG 4.

Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal. Beberapa pustakawan telah mempunyai kemampuan yang bagus dalam pelayanan teknologi, jumlahnya terbatas. Narasumber memperkirakan sekitar 30 sampai 40 persen sumber daya manusia yang dapat mengelola berbagai layanan digital secara maksimal.

Fenomena tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk perpustakaan mengingat saat ini bertransformasi menuju layanan berbasis teknologi seperti katalog *online*, perpustakaan digital E-Pustaka, serta layanan berbasis internet lainnya yang memerlukan pustakawan terampil di bidang teknologi informasi. Apabila kompetensi sumber daya manusia tidak berkembang sejalan dengan transformasi digital maka pemanfaatan layanan masih belum maksimal.

Selain kompetensi untuk pelayanan digital, profesionalisme dan pengembangan SDM juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh pihak DPKA. Pustakawan yang berada di DPKA memiliki kompetensi profesional yang baik, tetap perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan layanan perpustakaan *modern*.

Peningkatan kompetensi dilakukan dengan bermacam pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, sejak pandemi covid-19, pelatihan dilaksanakan melalui *platform* Zoom. Menurut Yusuf, pelatihan yang dilakukan secara daring menyebabkan rendahnya konsentrasi dan partisipasi peserta dibandingkan pelatihan yang dilakukan dengan tatap muka. Dampaknya penyerapan pengetahuan dan keterampilan belum optimal.

Sarana dan Prasarana yang Terbatas Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pemustaka, secara keseluruhan fasilitas yang disediakan oleh pihak DPKA sudah baik dan mampu menunjang kegiatan pembelajaran. Namun demikian, diperlukan peningkatan beberapa fasilitas yang untuk memberikan kenyamanan yang lebih maksimal.

Salah satu fasilitas yang disoroti oleh pemustaka adalah keterbatasan tempat duduk di *outdoor*. Informan menilai jika tempat duduk yang tersedia belum dapat mengakomodasi jumlah pemustaka yang ingin beristirahat atau makan di sana. Ketika jumlah pengunjung meningkat, ketersediaan tempat belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan pengguna.

Selain itu, ketersediaan dua *lift* untuk pengunjung juga dinilai oleh pemustaka sangat membantu dalam aksesibilitas di perpustakaan. Tetapi, sewaktu-waktu, kondisi salah satu *lift* yang mengalami gangguan bersamaan dengan tingginya tingkat kunjungan menjadikan pengunjung lama mengantre.

Penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun DPKA telah menyediakan berbagai fasilitas, peningkatan juga tetap diperlukan mengingat jumlah kunjungan pemustaka yang tinggi sehingga dapat mendukung kualitas pengalaman pemustaka dalam memanfaatkan pengalaman.

DPKA menyadari kebutuhan informasi adalah hak berbagai kalangan sehingga mereka menyediakan fasilitas informasi kepada pemustaka disabilitas. Tetapi, terdapat fasilitas seperti komputer yang masih diperlukan tahap pengembangan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pemustaka disabilitas dalam mengakses informasi secara

mandiri. Dengan demikian, tersedianya fasilitas fisik yang memadai adalah salah satu faktor yang mendukung lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman. Meski tidak secara langsung dengan informasi, tetapi fasilitas yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai sebagai tempat belajar sepanjang hayat.

Kedua, Tantangan Eksternal. Adapun tantangan eksternal yang dihadapi oleh DPKA diantaranya persaingan dengan teknologi digital dan kesadaran masyarakat terhadap perpustakaan. *Persaingan dengan teknologi digital*, salah seorang informan menyatakan bahwa internet memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara lebih cepat melalui mesin pencari. Sementara itu, informan lain menjelaskan bahwa penggunaan internet lebih praktis karena tidak terikat oleh jarak tempuh dan jam layanan perpustakaan. Ini memperlihatkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk perpustakaan dalam mempertahankan perpustakaan yang relevan di tengah peningkatan arus informasi.

Meskipun demikian, DPKA tetap memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam menyediakan sumber informasi yang telah melalui proses seleksi dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital seperti E-Pustaka Aceh menjadi salah satu strategi yang dilakukan DPKA sebagai bentuk penyesuaian layanan perpustakaan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Apabila dikaitkan dengan SDG 4, penemuan ini menjelaskan bahwa sekarang ini akses kepada informasi tidak lagi tergantung pada keberadaan fisik perpustakaan,

sehingga perpustakaan harus bertransformasi dari yang semulanya penyedia koleksi menjadi penyedia informasi. Keberadaan E-Pustaka adalah contoh nyata DPKA untuk tetap terus mendukung akses pembelajaran dan informasi yang inklusif sesuai dengan tujuan SDG 4.

Kedua, kesadaran masyarakat terhadap perpustakaan. Narasumber menjelaskan jika paradigma tersebut biasanya masih ada pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat yang belum pernah memanfaatkan perpustakaan secara langsung. Dari hal tersebut, inovasi dan program yang dikembangkan DPKA belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Kondisi ini menjadi tantangan untuk DPKA untuk meningkatkan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKA.

Salah satu upaya yang dilakukan DPKA untuk menjawab tantangan tersebut adalah mempromosikan dan mensosialisasikan lewat media sosial. Media sosial dimanfaatkan untuk memperlihatkan berbagai jenis koleksi dan layanan yang tersedia sehingga membangun persepsi perpustakaan yang modern, terbuka, dan sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

Meskipun demikian, pencapaian yang dilakukan melalui promosi media sosial masih terbatas, terutama perihal masyarakat yang akses internetnya terbatas atau tidak aktif menggunakan media digital. Maka dari itu, perlu adanya strategi promosi yang bervariasi agar informasi layanan perpustakaan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, memperlihatkan bahwa berhasilnya program perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh layanan dan fasilitas, melainkan juga dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan perpustakaan. Dalam konteks SDG, akses pendidikan dan pembelajaran hayat tidak akan maksimal jika kesadaran masyarakat terhadap manfaat perpustakaan masih kurang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai peran perpustakaan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Secara keseluruhan program-program yang diselenggarakan oleh DPKA seperti literasi anak, perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan sosial, serta pelatihan keterampilan masyarakat memperlihatkan perannya dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menandakan program DPKA mempunyai relevansi dengan *sustainable development goal*, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas.

Pemimpin perpustakaan sadar akan adanya SDG, tetapi hanya sebatas pengetahuan saja. Ketika ditanya mengenai keterkaitan program dengan SDG, narasumber mengakui bahwa konsep SDGs telah dikenal, tetapi belum menjadi acuan utama dalam penyusunan maupun pengembangan program perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan SDG sebagai kerangka kerja dalam perencanaan program masih belum dilakukan secara eksplisit. Fenomena tersebut terjadi karena DPKA mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional.

Selain itu, belum ada sosialisasi secara khusus kepada pustakawan dalam memahami SDG di lingkungan perpustakaan. Namun, pustakawan tersebut memahami dan menyadari perpustakaan harus memberikan akses informasi, literasi,

dan menjadi pusat belajar masyarakat umum. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan tersebut sebenarnya sudah selaras dengan pemahaman konteks SDG 4 (Pendidikan berkualitas), meskipun pelaksananya tidak menyadari apa yang dilakukan telah sejalan perwujudan SDG 4.

DPKA terindikasi adanya penerapan SDG 4 yang bersifat implisit. Maknanya, berbagai program yang dilaksanakan DPKA mendukung pencapaian tujuan pendidikan berkualitas melalui pelayanan akses informasi, literasi, dan pembelajaran masyarakat. DPKA sebenarnya telah menjalankan nilai SDG 4 tetapi belum melalui pendekatan perwujudan SDG di dalam bentuk kerangka formal, baik dari segi kebijakan, maupun pelaksanaan program. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik dan kebijakan. Di satu sisi, DPKA telah menjalankan berbagai program yang mendukung akses pendidikan, literasi, inklusi sosial, dan pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan bagian dari SDG 4.

Fenomena ini memiliki dampak. Program DPKA yang ternyata memiliki relevansi dengan perwujudan SDG 4 dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat justru belum didokumentasikan secara maksimal dalam sebuah laporan resmi. Padahal, dengan penggunaan kerangka SDG secara formal dapat memperlihatkan peran pentingnya terhadap perwujudan *sustainable development goal*, terkhususnya pendidikan berkualitas. Dengan demikian, sinergi yang diciptakan oleh DPKA terlihat dari proses implementasinya daripada penerapan SDG sebagai kerangka resmi yang eksplisit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tentang sinergi program perpustakaan dengan *sustainable development goal 4* (Pendidikan Berkualitas), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah menjalankan perannya dalam mensinergikan program perpustakaan dengan Sustainable Development Goals 4 (Pendidikan Berkualitas) yakni sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Sebagai fasilitator, DPKA menyediakan akses informasi melalui koleksi beragam, E-Pustaka Aceh, Perpustakaan Keliling (POCADI), dan meja informasi, sekaligus mewujudkan ruang inklusif melalui layanan gratis untuk seluruh kalangan, layanan penyandang disabilitas, dan program TPBIS yang kini mencakup 595 perpustakaan desa di seluruh Aceh. Program-program ini berkontribusi pada target SDG 4.1 dan 4.5. Sebagai motivator, DPKA mendorong literasi dini melalui storytelling, lomba mendongeng, kampanye membaca, dan bedah buku yang menyasar anak-anak usia sekolah dasar, serta memotivasi pembelajaran sepanjang hayat melalui serangkaian BIMTEK kepenulisan, literasi informasi, dan sayembara menulis yang berkontribusi pada target

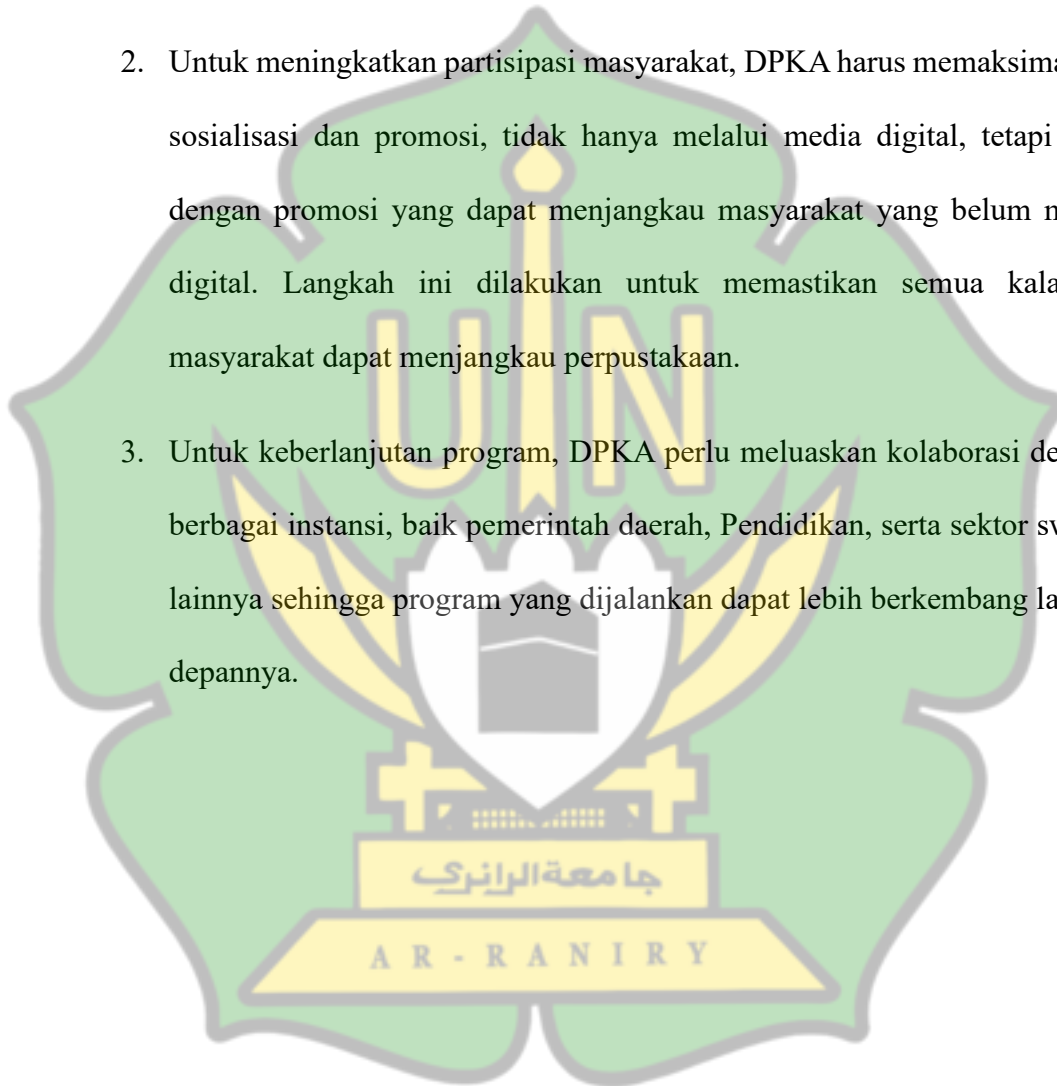
SDG 4.1, 4.3, dan 4.6. Sebagai mediator, DPKA menjembatani kebutuhan keterampilan praktis masyarakat melalui workshop keterampilan, BIMTEK Konten Kreator, festival UMKM, dan komunitas seni, sekaligus memfasilitasi akses informasi berbasis kebutuhan nyata pemustaka melalui mekanisme survei pengadaan koleksi yang berkontribusi pada target SDG 4.3, 4.4, dan 4.5.

2. Tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam, baik dari internal, tantangan kelembagaan dan sosial, serta tantangan eksternal. Di sisi internal, anggaran dan sumber daya manusia merupakan tantangan utama dalam keberlanjutan program. Tantangan sosial dan kelembagaan terdiri dari dari keadilan akses dan kolaborasi yang lemah. Sementara itu, tantangan eksternal juga dihadapi oleh DPKA, diantaranya kemajuan teknologi digital, paradigma lama perpustakaan yang masih melekat di masyarakat.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mensinergikan program dengan SDG 4 Pendidikan Berkualitas mengungkapkan bahwa perpustakaan sebenarnya telah berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4 tetapi belum terdapat dokumen atau kebijakan resmi yang secara nyata menjadikan SDG 4 sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program perpustakaan sehingga kontribusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam perwujudan SDG 4 belum terdokumentasi secara resmi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyarankan:

1. Untuk DPKA, disarankan untuk mengintegrasikan secara eksplisit ke dalam kebijakan resmi perencanaan dan pelaksanaan program perpustakaan. Ini dilakukan untuk memperjelas kontribusi yang dilakukan DPKA dalam mencapai Pendidikan yang berkualitas.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, DPKA harus memaksimalkan sosialisasi dan promosi, tidak hanya melalui media digital, tetapi juga dengan promosi yang dapat menjangkau masyarakat yang belum melek digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat menjangkau perpustakaan.
3. Untuk keberlanjutan program, DPKA perlu meluaskan kolaborasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah daerah, Pendidikan, serta sektor swasta lainnya sehingga program yang dijalankan dapat lebih berkembang lagi ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agustina, Vera. "Perpustakaan Sebagai Pusat Pengetahuan , Pendidikan , Dan Inovasi Di." *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan* 5, no. 1 (2025): 1–8.
- Akselerator SDG. "Sustainable Development Goals: Latar Belakang Tujuan." UNDP. Accessed July 20, 2025. <https://www.undp.org/sdg-accelerator/background-goals>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III," 2025. https://kbbi.web.id/sinergi#google_vignette.
- Bapedda. "Sejarah Singkat Adanya SDGs." Bapedda Kalimantan Barat. Accessed July 20, 2025. <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>.
- Departemen Ekonomi dan Sosial. "Sustainable Development Goal 4." United Nations, n.d. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>.
- Department of Economic and Social and Sustainable Development. "Memastikan Pendidikan Berkualitas Yang Inklusif Dan Adil Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua." United Station. Accessed April 15, 2026. <https://sdgs.un.org/goals/goal4#undefined>.
- Department of Economic and Social, and Sustainable Development. "Contribution of Libraries to the SDGs." United Nations, 2016. https://sdgs.un.org/partnerships/contribution-libraries-sdgs?utm_source.
- . "THE 17 GOALS." United Nations. Accessed July 20, 2025. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. "Profil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh," 2026. https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9.
- Elvitasari, Regina Feodora, and Mecca Arfa. "Peran Perpustakaan Dalam Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah." *ANUVA: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 9, no. 4 (2024): 627–38. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/26027/>.
- Endarti, Sri. "Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi." *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan* 2, no. 1 (2022): 23–28. <https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>.
- Firmansyah, Deri, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.
- Hidayat, Fandi Rahman, Sofia Nur Aisyah, and Felisha Ghassani. "Pemanfaatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Sesuai Dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030." *Media Pustakawan* 29, no. 3 (2022): 309–22. <https://doi.org/10.37014/medpus.v29i3.3448>.
- Humas Arpus. "DPKA Tingkatkan Aplikasi Inlislite Dan Sosialisasi E-Books Dikabupaten Aceh Tengah." Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2023. https://arpus.acehprov.go.id/?p=4065&utm_source.

- . “Kepala DPKA: Penguatan Literasi Salah Satu Aspek Pengurangan Kemiskinan.” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025. https://arpus.acehprov.go.id/?p=4526&utm_source.
- . “Perpustakaan Nasional Dan DPKA Berkomitmen Untuk Transformasi Perpustakaan Yang Berkelanjutan.” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2022. <https://arpus.acehprov.go.id/?p=3626>.
- Husnullail. M, Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70.
- Ifla. “Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda,” no. March (2021): 1–32. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- IFLA. “Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.” Accessed October 14, 2025. <https://www.ifla.org/units/sustainable-development/>.
- IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). “Global Vision Report Summary: Top 10 Highlights and Opportunities.” The Hague, 2018. <https://www.ifla.org/globalvision/>.
- Ilhami, Ilhami, M Satrio Rofi Fadil, Rheina Ferina, and Syifa Aulia Assabilla. “Analisis Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Perpustakaan Di Era Digital.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i2.284>.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Vol. 7, 2007.
- Jamridafrizal, Zulfitri, and Muhammad Farid Wajdi. *Perpustakaan Sebagai Institusi: Perspektif Organisasi Dan Regulasi*. Edited by M.Kom Andi Saputra, S.Kom. *Perpustakaan Sebagai Institusi Perspektif Organisasi Dan Regulasi*. 1st ed. Serang: Yayasan Laksita Indonesia, 2024.
- Jaya, I Nengah, S. “Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Bagi Pemustaka.” *Msip* 4, no. 2 (2024): 70–80.
- Jaya, I Nengah Sutrisna. “Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Bagi Pemustaka” 4, no. 2 (2024): 1–14.
- Kautsar, Rahmat, Hamidi Ilhami, and Muhammad Nur Effendi. “Preservasi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Umum Kota Banjarmasin” 10, no. 1 (2022): 49–58.
- Kustiawan, Winda, Muhammad Daffa Raihan, and Muhammad Ibnu Thariq. “Pendekatan Metode Penelitian Lokasi Dan Waktu Informan Dan Penyusunan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 5051–55.
- Mulyana, Asma. “Manajemen Sumberdaya Manusia Perpustakaan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan” 2, no. 1 (2026): 21–31.
- Nations United Development Programme. “Sustainable Development Goals.” Accessed July 20, 2025. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.
- Novianti, Dinda Ayu, Ananda Dyah Ayu Kumala, Wahyu Enggar Wulandari, and Ganis Chandra Puspitadewi. “Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick.” *LibTech: Library and Information Science Journal* 4, no. 1 (2023): 15–29.

<https://doi.org/10.18860/libtech.v4i1.19798>.

NS, Sutarno. *Perpustakaan Dan Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006.

Nur, Allya, Aini Roesadhi, Annisa Deli, Saputri Pasaribu, and Najwa Fahraini Nasution. "Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research," 2026, 14330–44.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017).

Pertiwi, Maurina Suryaning. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Perwujudan Perdamaian Dunia." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (2023): 86. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104>.

Pohan, Rahmad Mangaraja, Sri Rohyanti Zulaikha, and Cut Afrina. "Manajemen Perpustakaan Sebagai Pendorong Pendidikan Berkualitas Di Indonesia Menuju SDGs 2030." *JIPIS (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam)* 4, no. 2 (2025): 125–40.

Purwanugraha, Andri, Herdian Kertayasa, Pendidikan Universitas, and Mandiri Subang. "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>.

Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

Ramadani, Nurmila, Andi Ahmad Chabir Galib, Muhammad Nasru, Karmila Pare Allo, and Wulandari. "Analisis Kebijakan Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Enrekang Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)* 4, no. 2 (2026): 1–12.

Rohmaniyah, Kartika Sari. "Peran Perpustakaan Dalam Mengembangkan Literasi Dan Pengetahuan Masyarakat." *DE FACTO: Journal Of International Multidisciplinary Science* 2, no. 02 (2024): 40–51. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/defacto/indexDOI:https://doi.org/10.62668/defacto.v2i01.1026>.

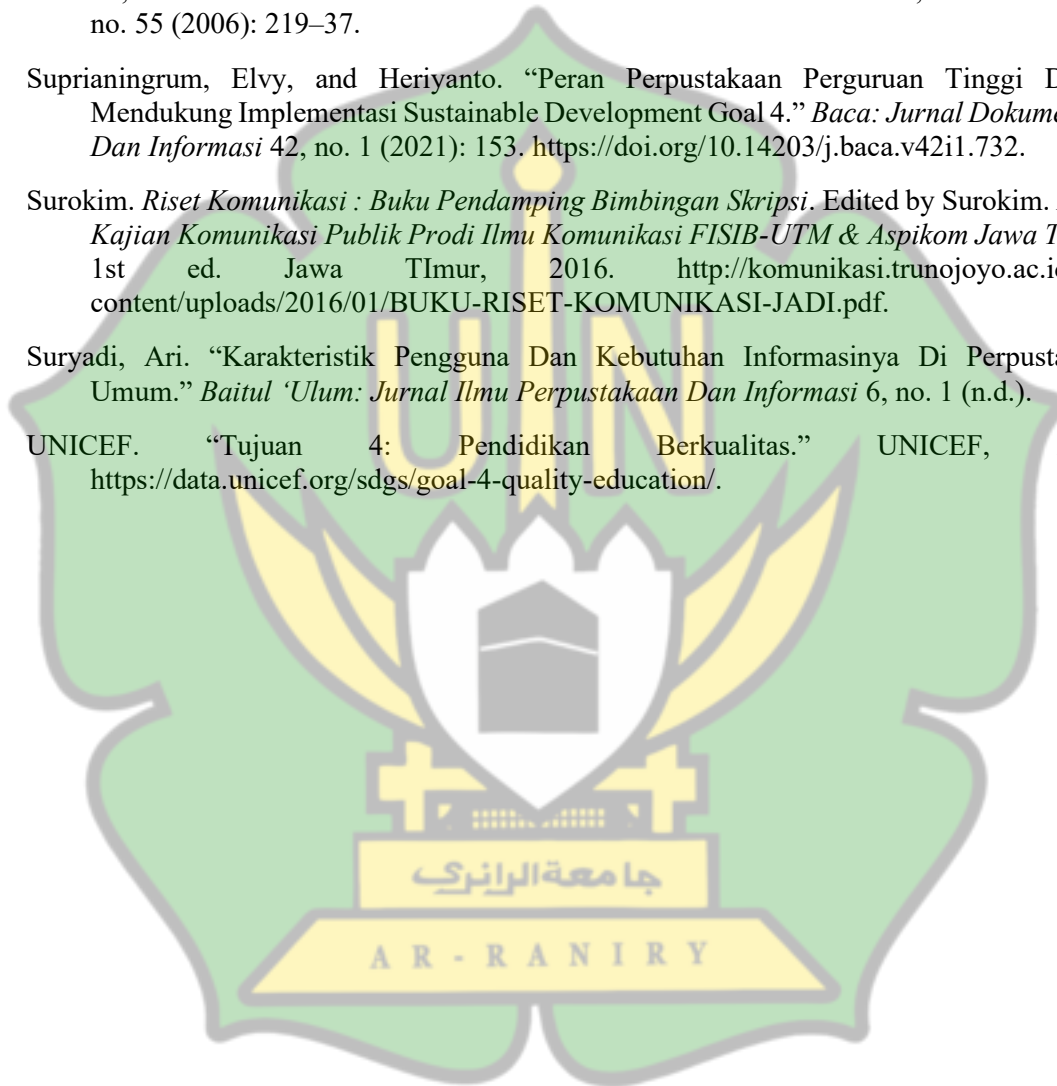
Rustam, Najla, Arin Khairunnisa, Universitas Ibn, and Khaldun Bogor. "Perpustakaan Adalah Salah Satu Tempat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Library Is A Place For Long Life Learning)." *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 3 (2023): 6–11.

Sari, Lailathul Indra. "Tata Kelola Kolaborasi Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Di Kabupaten Magelang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 1, no. 1 (2024): 93–110.

Sekretariat Nasional SDGs. "Goal 4: Pendidikan Berkualitas." Bappenas, n.d. <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>.

Siahaan, Riris Lawitta Maulina, Juli Arianti, and Najdah Thalib. "Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 975–85. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.

- Sonkkanen, Leila. "Bringing Environmental Awareness of Public Libraries to the 2020s." In *ENSULIB Satellite Meeting, IFLA WLIC 2022*, 22–23. Cork, Ireland: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2022).
- Suhermik, and Indah Rachma Cahyani. "MEWUJUDKAN AIRLANGGA UNIVERSITY LIBRARY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)." *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* 10, no. 2 (2017): 83–93.
- Sulasmi, Siti. "PERAN VARIABEL PERILAKU BELAJAR INOVATIF , INTENSITAS," no. 55 (2006): 219–37.
- Suprianingrum, Elvy, and Heriyanto. "Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Implementasi Sustainable Development Goal 4." *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 42, no. 1 (2021): 153. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.732>.
- Surokim. *Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. Edited by Surokim. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*. 1st ed. Jawa Timur, 2016. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>.
- Suryadi, Ari. "Karakteristik Pengguna Dan Kebutuhan Informasinya Di Perpustakaan Umum." *Baitul 'Uhum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 6, no. 1 (n.d.).
- UNICEF. "Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas." UNICEF, 2025. <https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/>.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1657/Un.08/FAH.I/PP.000.9/05/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220503005

Nama : RISSA SAHARA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Alamat : Lr. Tgk Ibrahim Seulanga Meunasah Dayah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DAN TANTANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH DALAM MENSINERGIKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DENGAN SDG4 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4)**

Banda Aceh, 11 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 11 Agustus 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

PEMERINTAH ACEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh Kode Pos: 23125
Telepon : (0651) 7552323, Faksimil : (0651) 7551239
Laman : arpus.acehprov.go.id, Pos-el : arpus.acehprov.go.id

Banda Aceh, 13 Mei 2026
25 Dzulqadah 1447

Nomor : 400.14.5.4/603/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Izin Penelitian

Yang Terhormat :
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Adab dan Humaniora – UIN AR-RANIRY
di –
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1657/Un.08/FAH.I/PP.000.9/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Mahasiswa Saudara:

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	RISSA SAHARA	220503005	Ilmu Perpustakaan

Untuk melakukan Penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2. Kami berharap selama melakukan Penelitian agar yang bersangkutan tetap disiplin dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
PIN. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
AR - RANIRY



Mountie Syurga, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197108301997031004
ND Nomor : 800.1/589/2026 Tanggal 08 Mei 2026

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN DAN TANTANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN ACEH DALAM MENSINERGIKAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN DENGAN SDGS (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOAL 4*)**

I. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal

:

2. Waktu

:

3. Tempat

:

II. Identitas Responden

1. Nama

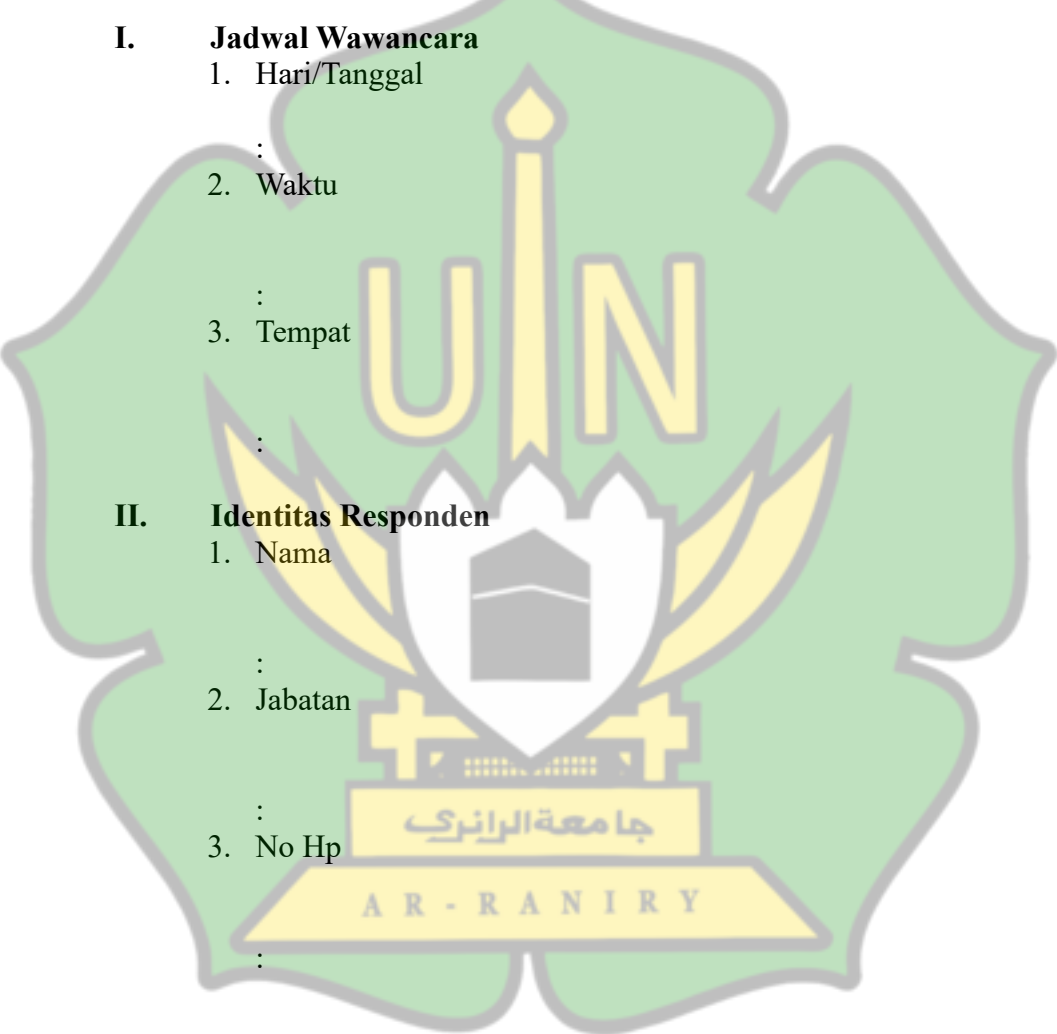
:

2. Jabatan

:

3. No Hp

:



No	Pertanyaan Wawancara	Tujuan
1.	1. Apa saja program yang benar-benar berjalan dalam 1–2 tahun terakhir yang berkaitan dengan peningkatan literasi, mempermudah akses informasi, dan pembelajaran sepanjang hayat,	Melihat program mana yang masuk ke akses informasi, literasi, inklusi.

	dan mana yang menurut Bapak/Ibu paling berdampak?	
2.	1. Bagaimana perpustakaan berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran sepanjang hayat? 2. Siapa saja yang menjadi sasaran utama layanan ini? Apa ada sasaran prioritas seperti kelompok tertentu? 3. Bagaimana Dinas memastikan bahwa masyarakat yang tinggal jauh di kota dan yang tidak punya uang tetap dapat memanfaatkan perpustakaan? 4. Apakah pernah ada Masyarakat yang mengeluh yang merasa jika layanan tidak menjangkau mereka? 5. Bagaimana memastikan layanan perpustakaan dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas?	Pilar inklusivitas
3.	1. Ada tidak program khusus yang menyasar anak-anak, terutama yang masih kecil atau baru belajar membaca? 2. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah minat baca anak-anak di Aceh sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir atau justru sebaliknya? 3. Program literasi apa yang dikelola oleh bidang pelayanan dan bagaimana pelaksanaannya? 4. Apakah ada target capaian literasi yang ditetapkan dalam program layanan perpustakaan?	Literasi Dini
4.	1. Apakah koleksi yang ada sudah cukup mewakili kebutuhan berbagai kelompok, dari pelajar, mahasiswa, sampai warga biasa yang mau cari informasi? 2. Program layanan apa yang diberikan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah?	Pilar Akses Informasi
5.	1. Tantangan seperti apa yang dihadapi ketika membuat program perpustakaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan?	Tantangan

	2. Pernahkah ada program yang tidak berjalan sesuai harapan? Apa penyebabnya? 3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menghambat Masyarakat (anak-anak, remaja, dewasa) untuk memanfaatkan layanan perpustakaan?	
6.	1. Apa hambatan dalam membentuk program perpustakaan yang mendukung literasi, akses informasi, dan pembelajaran sepanjang hayat? 2. Bagaimana sumber daya manusia dalam mendukung program? 3. Apakah fasilitas dan sarana sudah memadai untuk mendukung program yang dijalankan?	Hambatan
7.	1. Apakah dalam perencanaan program pernah secara langsung mengacu pada program pembangunan berkelanjutan? 2. Perubahan pertama apa yang ingin segera dilakukan untuk membuat perpustakaan ini lebih berguna bagi masyarakat? 3. Menurut Bapak/Ibu, seperti apa idealnya perpustakaan Aceh sepuluh tahun ke depan?	Menggali visi, peneliti menganalisis apakah visi tersebut selaras dengan SDG 4

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Sub Koordinator Layanan Perpustakaan DPKA



Gambar 2 Wawancara dengan Koordinator Pustakawan Aceh



Gambar 3 Wawancara dengan Pemustaka



Gambar 4 Wawancara dengan Pemustaka